

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*  
(CAR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP  
ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM)  
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015 - 2017**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*  
(CAR) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP  
ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM)  
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015 - 2017**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh

DEWI SULASTRI  
NPM : 1451020034

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.  
Pembimbing II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu bertahan setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Namun, disisi lain UMKM masih juga dihadapkan pada persoalan dalam memperoleh modal, guna ekspansi usaha yang lebih maju. Sektor Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis dan juga sosial sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Dilihat dari besarnya aset Bank Umum Syariah pada tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan aset yang cukup signifikan. Hal ini bisa ditinjau dengan indikator dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR) dan *non performing financing* (NPF).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah.

Penelitian ini menggunakan statistik Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dalam laporan keuangan Statistik Perbankan Syariah yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan statistik perbankan syariah, data bulanan Bank Umum Syariah yang di peroleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik Uji hipotesis dilakukan dengan uji F, uji t, dan koefisien *Adjusted R<sup>2</sup>*, dengan taraf signifikansi sebesar 5% pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23.

Dari hasil analisis secara simultan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) diketahui *dpk* *car* dan *npf* mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Kedua variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan sebesar 98,5% dan sisanya 1,5% dipengaruhi variabel lainnya. Secara parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah, Variabel *capital adequacy ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga H1 diterima, H2 ditolak dan H3 diterima.

Kata kunci : DPK, CAR, NPF, UMKM.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015–2017**

**Nama : Dewi Sulastri**  
**NPM : 1451020034**  
**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**  
**Jurusan : Perbankan Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.**  
**NIP. 1977072520021211001**

**Agus Kurniawan, S.E., M.Ak.**  
**NIP. -**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
**NIP. 197905142003121003**





**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung 35131**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015–2017**, disusun oleh **Dewi Sulastri, NPM: 1451020034**, Jurusan **Perbankan Syari'ah**, diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada :

Hari/tanggal : Rabu / 28 November 2018

Waktu : 15.00 – 16.30

Ruangan : Dekanat Lantai 3A

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua sidang : A. Zuliansyah, S.Si., M.M. (.....)

Penguji 1 : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I. (.....)

Penguji 2 : Agus Kurniawan, S.E., M.Ak (.....)

Sekretaris : Dimas Pratomo, S.E., M.S.I. (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Dr. Moh Dahrudin., M.A**

**NIP: 19580824 1989031003**



## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al- Hadid : 11)<sup>1</sup>



---

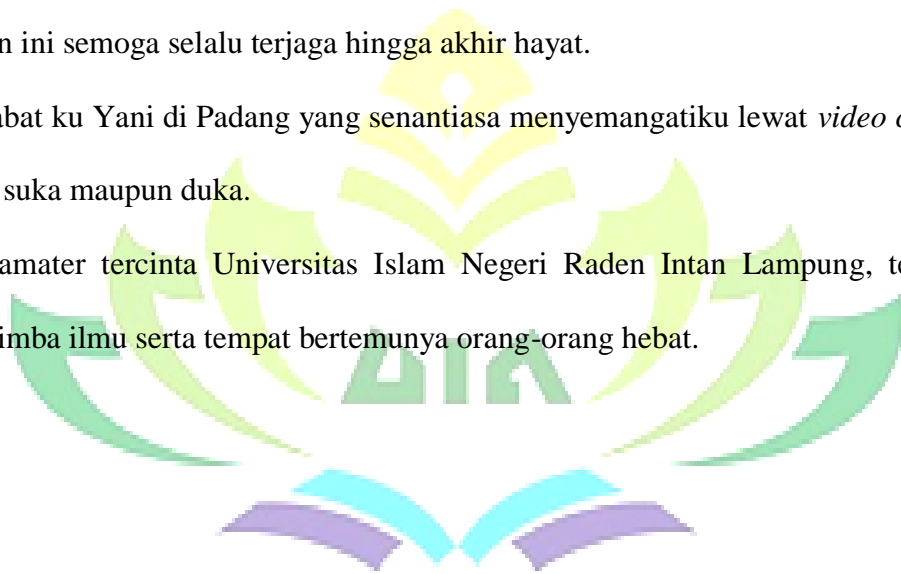
<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 538.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Ibu Dasini dan Bapak Sukandar yang senantiasa memberikan kasih sayang tanpa batas, do'a tanpa henti, dukungan baik secara materi maupun moral, memberikan semangat yang terus menerus, sehingga skripsi ini selesai. Serta kedua adikku Devi Nurlita dan Muhammad Damar Ramadhan yang sangat saya sayangi. Terima kasih, kalian penyemangat paling hebat.
2. Bibiku Lia Lestari (calon S.Pd) yang merangkap sebagai teman, sahabat bahkan mbak sebagai tempat curhat seputar skripsi dan saling menyemangati serta membantu satu sama lain.
3. Mbahku Wiri yang senantiasa berdoa dan menggebu-gebu agar cepet lulus dan dapat pekerjaan supaya kelak bisa *urip ayem*.
4. Mamasku Rudi Setiawan, S.Sos. yang telah memberikan energi cintanya untuk selalu siap siaga kala diri ini melemah serta menjadi penyemangat sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat Kecilku Rahmiati, Iin Oktaviani dan Agnes maria yang selalu menghibur kala duka malanda dan *remote support system*. Meski kini beda provinsi tapi tetap bersama menjalin silaturahmi sangat baik, walau lautan memisahkan kita namun kalian selalu bersama-sama memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Sahabat tercinta dan seperjuangan Sevi Selviana, Sri Wahyuningtyas, Marina Suci Handayani, Linda Fatmawati, Rizka Komala Asri, Olga Corry Ayuningtyas, Atika Mardiana, Tiara Azizah, Shella Sujita, Oktavia Rosana Dewi, Eka Laila Fitriani, Eka Nur Safitri, Rifka Nazilatur Rahmah, Maya Sari, Refan Yunandar dan Ananda Kurniawan Husein. Tanpa kalian aku kesepian dan tanpa kalian aku bukanlah siapa siapa, *big thanks* untuk persahabatan selama 4 tahun ini semoga selalu terjaga hingga akhir hayat.
7. Sahabat ku Yani di Padang yang senantiasa menyemangatiku lewat *video call* di kala suka maupun duka.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu serta tempat bertemunya orang-orang hebat.

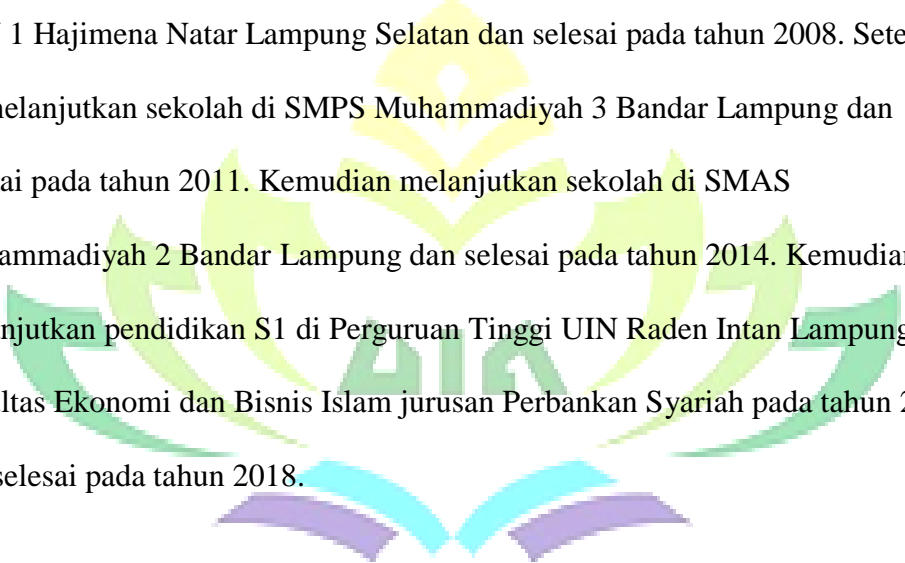




## **RIWAYAT HIDUP**

Dewi Sulastri, dilahirkan di Bandar Lampung pada 1 Oktober 1996, anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Sukandar dan Ibu Dasini.

Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal Serbajadi Hajimena Kecamatan Natar dan lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan sekolah di SDN 1 Hajimena Natar Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMPS Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah di SMAS Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.

A large, semi-transparent watermark logo of UIN Raden Intan Lampung is centered in the background of the text. The logo features a green circular emblem with a yellow sun-like symbol at the top, and the text 'UIN RADEN INTAN LAMPUNG' in green capital letters across the middle. Below the emblem are two stylized, curved shapes in light blue and purple.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015 – 2017 ” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Budimansyah, S. Th.I., M.Kom.I selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. dan bapak Muhammad Kurniawan M.E.Sy selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seluruh teman – teman angkatan 2014, Khususnya Perbankan Syariah kelas E dan teman – teman KKN Sidoreno Waypanji Lampung Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas persahabatan yang tidak akan pernah penulis lupakan.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini dengan lancar.



Semoga bantuan dan keberkahan dari Allah SWT sesuai dengan amal ibadah kita. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Aamiin yaa robbal ‘alaamiin.

Bandar Lampung, 28 November  
2018

Penulis



**Dewi Sulastr**

**1451020034**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang .....	6
D. Rumusan Masalah .....	17
E. Tujuan Penelitian .....	17
F. Kegunaan Penelitian.....	18

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah .....	19
B. Pembiayaan .....	29
C. Dana Pihak Ketiga .....	43
D. <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	52
E. <i>Non Performing Financing</i> .....	64
F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	67
G. Penelitian Terdahulu .....	78
H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis .....	82

I. Kerangka Berfikir .....	87
----------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	90
B. Jenis dan Sumber Data .....	91
C. Populasi dan Sampel .....	92
D. Metode Pengumpulan Data .....	93
E. Definisi Operasional Penelitian.....	94
F. Teknik Analisis Data.....	98

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	105
B. Analisis Data .....	109
C. Hasil Penelitian .....	115
D. Pembahasan.....	120

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	133
B. Saran.....	135

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	137
-----------------------------	-----

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performance Financing* (NPF) terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017” sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>2</sup> Atau pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>3</sup>

#### 2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 39.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 102.

pengendapan yang memadai.<sup>4</sup> Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.<sup>5</sup>

### 3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.<sup>6</sup>

### 4. *Non Performance Financing (NPF)*

NPF adalah Pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 165.

<sup>5</sup> Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), dikutip oleh Hani Oktarina Nursyarifah, *Pengaruh DPK, FDR, dan ISR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2015* (Skripsi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung, 2017), h. 13.

<sup>6</sup> Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 37.

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 475.

## 5. Alokasi Dana

Alokasi Dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana pihak perbankan membaginya ke dalam presentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini.<sup>8</sup>

## 6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan.<sup>9</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>10</sup> Istilah pembiayaan pada intinya adalah menaruh kepercayaan, yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dan tersebut harus digunakan dengan benar,

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 84.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 40.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 260.



adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>11</sup>

#### 7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro dan Kecil Menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>12</sup>

### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Objektif**

Bank merupakan sarana intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank akan menerima dana dari masyarakat (DPK) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menyimpan dananya pada bank, semakin banyak pula dana yang akan dikelola oleh bank salah satunya adalah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka

---

<sup>11</sup> Veitzhal Rivai, *Manajemen Kelembagaan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 4.

<sup>12</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.

mengalami kesulitan. Namun disisi lain hal ini juga sebagai momok bagi pihak bank apabila terjadi kendala bila ada nasabah lalai dalam pemenuhan kewajibannya terhadap pihak bank, atau yang sering di sebut pembiayaan macet/pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*). Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dana pengaruh pihak ketiga (DPK) , *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performance Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017.

## **2. Secara Subjektif**

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh Dana Pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selain itu juga memberikan wawasan bagi pihak bank syariah agar lebih meningkatkan alokasi pembiayaan kepada pelaku UMKM. Serta memberikan wawasan kepada calon nasabah pembiayaan UMKM tentang analisis pembiayaan di Perbankan Syariah sehingga bisa menjadi panduan dalam melakukan pembiayaan.
- b. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai perbankan syariah, selain itu juga pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program study Perbankan Syariah. Bahasan tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, khususnya Manajemen Perbankan Syariah. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta literaturanya tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel dan data yang diperlukan.

### **C. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya pada perekonomian global. Terbukti dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih mampu bertahan dan relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar.

Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 dan krisis tahun 2008 lalu yang merenggut banyak perekonomian di berbagai Negara Eropa bahkan Asia. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Jumlah UMKM yang ada meningkat dengan pesat, dari sekitar 7 ribu pada tahun 1980 menjadi sekitar 40 juta pada tahun 2001 dan mencapai 52,28 juta pada tahun 2011. Industri ini berkontribusi terhadap PDB sebesar 55,6% atau

Rp 673,9 T, devisa sebesar 20,2% atau Rp 183,8 T, investasi Rp 640,4 T atau sekitar 52,9% serta penyerapan tenaga kerja 101,7 orang. Melihat sumbangannya pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Khususnya lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) yang sukar dipenuhinya. Selain itu juga permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM.

Sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah*) sekaligus misi sosial (*tabarru'*) sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Untuk kepentingan UMKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah

debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut.

Pembiayaan-pembiayaan inilah yang harus dioptimalkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memajukan dan mengembangkan UMKM dengan cara memberikan pinjaman dengan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut ditujukan untuk membangun usaha yang produktif, jelas, transparan, dan halal, baik dari segi pengelolaannya hingga kepada hasil usahanya. Tidak cukup dengan hanya memberikan pembiayaan modal usaha, tetapi perbankan syariah juga harus berperan aktif sebagai lembaga pengawas dan konsultan guna menyokong dan memastikan sampai dimana perkembangan UMKM yang bersangkutan.

Dengan ruang-lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan sektor UMKM selalu tampil menjadi “pahlawan” bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantam ekonomi global. Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Bagaimana dengan kontribusi industri perbankan syariah nasional terhadap pertumbuhan sektor UMKM? Dengan data perkembangan UMKM yang tadi telah diungkapkan, ditambah dengan kenyataan bahwa populasi mayoritas penduduk indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor



UMKM, sepatutnya perbankan syariah bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi, diyakini praktek perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan nature dunia usaha sector UMKM.

Peranan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dalam dua dimensi, yaitu peranan dari sisi BUS sendiri dan dari sisi nasabahnya. Pembahasan di sisi BUS akan lebih ditekankan pada dua aspek, yaitu: Pertama, menganalisis peranan BUS dalam mendorong perkembangan sektor riil dengan fokus analisis pada pola pembiayaan menurut golongan pengguna, sektor dan jenis akad yang digunakan. Kedua, menganalisis kinerja dan pola pembiayaan BUS pada level operasional di salah satu kantor cabang. Sementara itu, penekanan analisis di sisi nasabah BUS akan lebih diarahkan pada aspek-aspek tentang motivasi nasabah, prosedur pembiayaan, pola pembiayaan, proses pengawasan dan pembinaan serta perkembangan usaha. Pembahasan di sisi nasabah sekaligus sebagai upaya untuk melihat apakah ada gap yang terjadi antara sisi kebijakan bank dengan implementasi di tingkat operasional.

Kontribusi Bank Umum Syariah dalam mendorong perkembangan sektor riil di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua indikator utama yaitu : Pertama, indikator penyaluran pembiayaan oleh BUS untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi yang terus bertambah. Kedua, porsi penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi Bank Umum Syariah terhadap total kredit Bank Umum untuk kredit modal kerja dan investasi juga semakin besar.

Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran perbankan syariah di sektor UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Sejauh ini dengan kekuatan 13 bank umum syariah (BUS), 34 unit usaha syariah (UUS) dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.173 unit, perbankan syariah nasional telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM diakhir tahun 2017 telah mencapai Rp 280.631 Miliar atau porsinya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada awal februari tahun 2018 itu, pertumbuhan aset Bank umum Syariah naik sebesar 20,65% atau sama dengan 429.99 Triliun bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi

pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau persinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah.<sup>13</sup>

Dari data fakta tersebut bisa dilihat bahwa kendala yang paling besar yaitu kesulitan para pelaku UMKM dalam memperoleh sumber modal. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko, biaya operasi, identifikasi usaha serta pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Melihat kendala yang ada, bank sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ketentuan pemberian plafon pembiayaan UMKM sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 7 Januari 2018 pukul 10.42 wib.

<sup>14</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 7 Januari 2018 pukul 10.43 wib.

**Tabel 1.1**  
**Presentase Plafon Pembiayaan UMKM 2013-2017**

Tahun	Presentase Plafon Pembiayaan UMKM
2015	Paling rendah 5% dari total pembiayaan
2016	Paling rendah 10% dari total pembiayaan
2017	Paling rendah 15% dari total pembiayaan

**Sumber: PBI No. 17/12/PBI/2015**

Pada tahun 2015, plafon Pembiayaan dinaikkan menjadi 5% dan setiap tahunnya akan dinaikkan sebesar 5%.<sup>15</sup> Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai peranan penting dalam penelitian ini karena Bank Umum Syariah (BUS) juga berfokus pada pembiayaan mikro (UMKM) dibanding pada sektor non-UMKM. Selain itu, Bank Indonesia memberikan fasilitas berupa pembiayaan likuiditas bagi BUS dalam bentuk Pembiayaan Modal Kerja (PMK-BUS) dan Pembiayaan bagi Pengusaha Kecil dan Mikro (PPKM) terutama untuk memenuhi permintaan pembiayaan usaha modal kerja dari nasabah pengusaha kecil dan mikro, sesuai arah dan sasaran yang hendak dicapai untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan pengusaha kecil dan mikro dipedesaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 7 Januari 2018 Pukul 10.58 wib

<sup>16</sup> Citra, Cahya Masturina. "Pengaruh NPF, DPK, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada BPRS di Indonesia". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, (2013), h. 14.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha**  
**Bank Umum Syariah (Rp Miliar)**

Bulan	Tahun		
	2015	2016	2017
<b>Januari</b>	<b>145.976</b>	<b>152.200</b>	<b>173.466</b>
<b>Februari</b>	<b>145.817</b>	<b>151.752</b>	<b>174.625</b>
<b>Maret</b>	<b>147.136</b>	<b>152.967</b>	<b>178.081</b>
<b>April</b>	<b>147.245</b>	<b>153.433</b>	<b>178.124</b>
<b>Mei</b>	<b>148.021</b>	<b>155.722</b>	<b>180.632</b>
<b>Juni</b>	<b>150.709</b>	<b>158.143</b>	<b>185.570</b>
<b>Juli</b>	<b>149.059</b>	<b>156.573</b>	<b>183.623</b>
<b>Agustus</b>	<b>149.287</b>	<b>156.623</b>	<b>184.354</b>
<b>September</b>	<b>151.157</b>	<b>171.979</b>	<b>186.152</b>
<b>Oktober</b>	<b>150.389</b>	<b>173.299</b>	<b>186.122</b>
<b>November</b>	<b>150.867</b>	<b>174.552</b>	<b>186.366</b>
<b>Desember</b>	<b>153.968</b>	<b>177.482</b>	<b>189.789</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017**

Secara garis besar, pembiayaan UMKM pada BUS setiap tahunnya mengalami peningkatan . Pada tahun 2015 tercatat 153.968 miliar dana pihak ketiga. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan yakni sebanyak 23.514 Miliar menjadi 177.482 Miliar. Pada tahun 2017 kembali meningkat hingga dana yang tersalurkan sebesar 189.789 Miliar Rupiah. Keadaan ini menandakan pembiayaan umkm membaik dan mulai meningkat.

Pengembangan pembiayaan UMKM pada BUS tergantung dari beberapa faktor. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi pembiayaan UMKM pada BUS. Faktor yang pertama yaitu besar kecil modal sendiri yang dimiliki oleh BUS. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang bisa dilihat dari



*Capital Adequacy Ratio* (CAR).<sup>17</sup> Menurut Pratiwi, semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar modal yang dimiliki oleh bank. Maka pembiayaan yang termasuk didalamnya pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disalurkan kepada masyarakat akan semakin banyak.<sup>18</sup>

**Tabel 1.3**  
**Persentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**  
**pada Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2015-2017**

Tahun	Persentase
2015	<b>15,02%</b>
2016	<b>16,63%</b>
2017	<b>17,91%</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017**

Secara garis besar, perkembangan CAR tiap tahunnya meningkat. Tahun 2015 menunjukkan angka 15,02%. Tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 1,61% menjadi 16,63%. Tahun 2017 pun mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 1,28% menjadi 17,91%.

Selain modal sebagai salah satu faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM pada BUS, dana pihak ketiga (DPK) atau sering disebut dana dari masyarakat juga menjadi faktor penentu. Penghimpunan DPK yang dilakukan oleh BUS berbentuk tabungan dan deposito dan giro. Menurut Kasmir, sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber DPK, termasuk

---

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1.

<sup>18</sup> Pratiwi, Susan., & Lela Hindasah. (2014). “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, *Net Interest Margin*, dan *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia” . *Jurnal Manajemen dan Bisnis* . Volume 5 No. 2 September 2014 . Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

dalam Pembiayaan UMKM. Berikut jumlah perkembangan jumlah DPK tahun 2013 hingga 2017.<sup>19</sup>

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah (dalam milyar)
2015	<b>174.895</b>
2016	<b>206.407</b>
2017	<b>238.225</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017**

Secara garis besar, jumlah dana pihak ketiga setiap tahunnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal ini merupakan implikasi bahwa banyak masyarakat yang mulai tertarik menginvestasikan dana yang dimiliki di BUS.

Pembiayaan UMKM pada BUS setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan karena faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM seperti CAR dan DPK juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, ada faktor lain yang perlu di perhatikan dalam pengembangan pembiayaan UMKM yaitu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Karena pembiayaan yang disalurkan BUS kepada masyarakat tidak semuanya dalam kategori sehat atau dengan kata lain dalam kategori bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam istilah perbankan disebut *Not Performing Financing (NPF)*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, bahwa secara netto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya berifat kompleks Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang

---

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 139.

berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki asset kecil.<sup>20</sup>

**Tabel 1.5**  
**Persentase *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017**

Tahun	Persentase
2015	<b>4,84%</b>
2016	<b>4,42%</b>
2017	<b>4,77%</b>

**Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2017**

Secara garis besar, persentase NPF cukup fluktuatif. Hingga terjadi kenaikan dan penurunan persentase NPF yang signifikan di tahun 2015 hingga tahun 2017 dikarenakan jumlah Pembiayaan yang diberikan semakin besar.

Pemaparan latar belakang di atas telah menjelaskan bagaimana perkembangan UMKM dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Hal tersebut mempunyai dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, variabel independen yang menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada pembiayaan UMKM dan waktu penelitian yang digunakan. Sehingga peneliti akan memfokuskan pada pengaruh CAR, DPK, dan NPF dengan judul, **"Pengaruh DPK, CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017"**.

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 176.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performance Financing* terhadap pembiayaan umkm.
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK, *CAR* dan *NPF* secara simultan terhadap pembiayaan umkm.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah se Indonesia.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan syariah, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu :*pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>21</sup>

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.<sup>22</sup> Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijaui praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang

---

<sup>21</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

<sup>22</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), h. 33.

dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Seperti yang termaktub dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>25</sup>; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa:29)<sup>26</sup>*

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT . Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007), h. 1.

<sup>25</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 83.

kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>27</sup> Adapun Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yaitu:

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

## **2. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap.

---

<sup>27</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 98.

Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari

---

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 43.

<sup>29</sup> Ismail *Op.cit*, h. 39.

masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al-mudharabah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

#### 4. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut Zainuddin Ali, “pada dasarnya sistem perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu: a. Prinsip keadilan, b. Menghindari kegiatan yang dilarang, dan c. Memperhatikan aspek kemanfaatan.”<sup>30</sup> Sedangkan prinsip dasar operasional Bank Islam menurut Veithzal Rivai dan Arifin, yaitu:

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h. 20.



Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu juga, Islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Qur'an:

- a. Prinsip *Al-Ta'awun*, merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan.
- b. Prinsip menghindari *Al-Ikhtinaz*, seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam perbankan Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
  - *Gharar*, adanya unsur ketidak pastian atau tipu muslihat dalam transaksi
  - *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
  - *Riba*, transaksi menggunakan sistem bunga.<sup>31</sup>

Menurut Bambang Tri Cahyono terdapat tiga prinsip bank syariah yaitu:

- a. Menjalankan operasional perbankan sejalan dengan syariah atau kaidah-kaidah agama islam.
- b. Menyelenggarakan pembiayaan hanya untuk proyek yang halal.
- c. Tidak memungut atau memberi imbalan bunga melainkan bagi

---

<sup>31</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 296.

hasil.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank dalam menjalankan operasionlanya harus berdasarkan syariah atau aturan-aturan Islam sehingga pembiayaan hanya pada proyek yang halal dan pengambilan keuntungan tidak boleh riba. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi: a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

---

<sup>32</sup> Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah* (Jakarta: IPWI, 1994), h. 33.

- e. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak Bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *muntahiya bittamlik* aatau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsi syariah.
- f. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- h. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- i. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- j. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- k. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.

- m. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada penghimpunan dana adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan pembiayaan dengan akad lainnya adalah *murabahah*, *salam*, *isthisna*, *ijarah muntahiyah bitamlik*, dan *qardh*.

## 5. Landasan Syariah Bank Islam

Bank Syariah sebagai salah satu bank Islam yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah memiliki produk giro, tabungan dan deposito dalam menghimpun dana dari masyarakat. Produk penghimpunan tersebut menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* yang pada prakteknya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Ayat Al-Qur'an tersebut, ialah:

- a. QS. Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]<sup>33</sup>; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( Q. S. An-Nisaa: 29)<sup>34</sup>*

Ayat di atas merupakan firman Allah SWT yang melarang kepada umatnya yaitu orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (segala bentuk transaksi lainnya) orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atau perniagaan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas. Sama halnya dengan transaksi pada perbankan harus dilakukan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat atau berdasarkan prinsip syariah dan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

b. QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]<sup>35</sup>. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah*

---

<sup>33</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 83.

<sup>35</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

*menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)*<sup>36</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa akad mengindikasikan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk mengikatkan diri mengenai suatu hal yang khusus termasuk dalam hal bermuamalah. Akad diwujudkan dalam ijab qabul. Maka proses penghimpunan dana pada bank syariah harus sesuai dengan syariah, yaitu dengan adanya kesepakatan diawal transaksi yang berupa akad. Akad yang digunakan dalam penghimpunan dana pihak ketiga adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikasi wadi'ah Bank Indonesia.<sup>37</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya adalah menaruh kepercayaan, perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dan tersebut harus digunakandengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 106.

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen dana bank syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 302.

syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Ma'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحْلَتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ ٱلْأَنعَمِ ۖ ٱلْأَمْرُ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلٍ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.<sup>39</sup> (Q.S. Al- Maidah:1)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>40</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>41</sup> Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

---

<sup>38</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>39</sup> A. Hasan, *Al-Furqan Tafsir Qur'an* (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2010), h. 134.

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Loc.Cit*.

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ( Yogyakarta; Ekonisia, 2005) h. 260.



*deficit unit*.<sup>42</sup> Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>43</sup> Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160.

<sup>43</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

<sup>44</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), h. 163.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>45</sup>

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan :

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.<sup>46</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan

---

<sup>45</sup> Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam [www.scribs.com](http://www.scribs.com). Diakses 15 april 2018.

<sup>46</sup> *Ibid*, Muhammad Ridwan ..... h. 164.

memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.<sup>47</sup>

### **3. Fungsi pembiayaan**

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah secara umum berfungsi sebagai :

#### **a. Meningkatkan daya guna uang**

Para penabung menyimpan uangnya di bank maupun lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya untuk bank maupun lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian dana yang mengendap di bank maupun lembaga keuangan (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengisaha maupun masyarakat.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Syafii Antonio ..... h. 37.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank maupun lembaga keuangan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank maupun lembaga keuangan kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasnya diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
  - 2) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
  - 3) Rehabilitasi prasarana.
  - 4) Pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pokok rakyat.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
- Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Amerika serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankanya telah melebarkan sayap perbankanya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.<sup>48</sup>

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni :<sup>49</sup>

- a. Pemilik

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.307-308.

<sup>49</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 303.

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya

3) Masyarakat umumnya- konsumen

Mereka dapat memperoleh barang- barang yang dibutuhkannya

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan- perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.<sup>50</sup>

## 5. Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sejak awal pada masa Rasulullah Saw, praktik pembiayaan atau lebih di kenal dengan peminjaman uang telah dipraktikkan dikalangan Sahabat Rasulullah Saw. Dengan konsentrasi pada pinjaman modal kerja berbasis bagi hasil. Dengan konsekuensi mengembalikan pinjaman secara utuh.<sup>51</sup>

Dalam perspektif Islam, pembiayaan lebih ditekankan pada pinjaman (*qard*) yang mana pihak yang meminjamkan tidak diperbolehkan mengambil tambahan dari nilai pinjaman dalam bentuk apapun, termasuk bunga yang di bebaskan. Bahkan dalam Al-Qur'an mengajarkan untuk menerima pengembalian pinjaman dalam jumlah tetap atau sama dengan nilai pokok.<sup>52</sup>

Selain itu, Muhammad dalam bukunya “Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah”, lebih menekankan pelaksanaan pembiayaan dalam aspek *syar’i* dan aspek ekonomi. Dalam aspek *syar’i*, lebih dikedepankan pada syari’at Islam dengan menghindari unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta

---

<sup>50</sup> *Ibid* h. 304.

<sup>51</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia Edisi I, Cet. ke I, 2003), h. 20.

<sup>52</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga studi kritis larangan riba dan interpretasi kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2004), h. 33.



usaha yang tidak halal. Sedangkan pada aspek ekonomi, keuntungan juga harus di perhatikan, dalam artian bagi hasil dari perolehan keuntungan.<sup>53</sup>

Dengan demikian, praktik pembiayaan dalam pandangan Islam diperbolehkan, dengan konsekuensi tidak adanya unsur kecurangan dalam hal *riba*, *maisir* dan *gharar*. serta praktek ini juga telah di lakukan pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat, yang pada waktu itu lebih di tekankan pada pembiayaan modal kerja investasi, dengan prinsip bagi hasil.

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tahun 2003, bahwa landasan syari'ah pembiayaan, yang pada fatwa tersebut tercantum pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* adalah sebagai berikut:

al-Qur'an Surat al-Baqarah 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>54</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

<sup>53</sup> Muhammad, *op.cit.* h. 16.

<sup>54</sup> Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283).<sup>55</sup>

Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَلْفَ أَمْجَارٍ كَرِيمٍ

Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (Q.S. Al-Hadid : 11)<sup>56</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang) itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”. (QS. al-Baqarah: 280).<sup>57</sup>

Hadis Rasulullah Saw. Yang artinya:

“Perdamaian dapat di lakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Au).

Menurut kaidah fiqh juga di sebutkan bahwa: “Pada dasarnya semua bentuk muammalah boleh dilakukannya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>58</sup>

## 6. Pembiayaan UMKM Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam prinsip ekonomi syariah, penopang utama perekonomian adalah sektor riil, sedangkan sektor moneter hanya sebagai pendukung. Prinsip ekonomi Syariah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 49.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Syekh H. Abdul halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

minus kegiatan maisir (spekulasi/judi), gharar (ketidakjelasan), riba, serta berbasis halal haram dan manfaat mudarat. Perekonomian yang dibangun di atas kekuatan sektor riil bertumpu pada produktivitas seluruh level masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan proporsional, hingga membentuk mata rantai perekonomian yang stabil dan tidak mudah goyah/mengalami tekanan, khususnya ketika dia membesar. Berbeda halnya jika penopang utama perekonomian adalah sektor keuangan yang rentan melibatkan unsur maisir, gharar, riba dan mengabaikan pertimbangan halal haram serta manfaat mudarat. Bangunan perekonomian tersebut akan sangat rentan mengalami tekanan ketika besar, karena mata rantai ekonomi yang terbentuk tidak memiliki persenyawaan komprehensif dikarenakan tidak berkontribusi secara riil dengan seluruh unsur ekonomi, yang meliputi konsumen, produsen, barang/jasa riil, kejelasan transaksi, nilai moral dan etika yang sejalan dengan halal haram serta manfaat mudarat.

Prinsip ekonomi syariah sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang merupakan jumlah mayoritas dimana umat berada di dalamnya. Melalui denyut nadi kegiatan usaha yang digerakkan oleh rakyat lah, bangunan ekonomi sebuah negara akan mengukuhkan kekuatan, kestabilan, kemandirian dan kedaulatannya. Dan bukan melalui denyut nadi UMKM negara lain/perusahaan besar negara lain yang mendistribusikan produk/jasanya di pasar milik rakyat Indonesia. Hal ini

sejalan dengan prinsip ekonomi syariah pada dasarnya berpedoman pada Falsafah Ekonomi Syariah yang memiliki satu tujuan, tiga pilar dan empat pondasi. Satu tujuan yaitu tercapinya kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material). Tiga Pilar Ekonomi Syariah yaitu:

- a. aktifitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, *excessive hoardings/ unproductive*, spekulatif, dan kesewenang-wenangan,
- b. adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan,
- c. Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. Adapun empat fondasi ekonomi syariah yaitu meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama, Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah, Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa Fondasi mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

dan market discipline. Lebih jelas tentang falsafah ekonomi islam tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: <sup>59</sup>



Gambar 2.1 Falsafah Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis Keuangan dan Perbankan Syariah<sup>60</sup>

## 7. Dasar Hukum Pembiayaan UMKM Bank Syariah

Pelaksanaan Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>59</sup> Machmud Amir, “ Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”. *Jurnal Indonesia Membangun* Vol 7 No.1 Maret-Juni 2008, ISSN 1412-6907, h. 34.

<sup>60</sup> Sumber : Suryomurti (2011)

- 2) Keputusan menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang bertindak sebagai peraturan pelaksana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan Pembiayaan.

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro yang dilakukan bank syariah dalam membantu pangsa pasar yang masih sangat rendah. Dengan adanya pembiayaan seperti itu, masyarakat mulai melirik bank syariah sebagai salah satu alternatif. Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan bank syariah terhadap UMKM diduga karena dibandingkan bank konvensional, lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan. Mereka yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional inilah yang merupakan calon nasabah bank syariah.<sup>61</sup>

## **C. Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

---

<sup>61</sup> Rizki Tri Anugrah B, Mochamad Bakri.dkk. *Op.Cit*, h. 79.

sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.<sup>62</sup> Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.<sup>63</sup> Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.<sup>64</sup>

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para nasabah. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (tabungan) dan simpanan tidak lancar (deposito). Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan depositi mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

---

<sup>62</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 413.

<sup>63</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Pertama, 2010), h. 43.

<sup>64</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-12, 2014), h. 71.



Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana dari masyarakat pada lembaga keuangan syariah, seperti: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan. Sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin meningkat pula.<sup>65</sup>

## **2. Jenis-jenis Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga**

Pada hakikatnya, proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah juga dikenal produk-produk berupa giro, tabungan dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontrapresi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah.<sup>66</sup>

Dengan demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah adalah:

### **a. Tabungan**

Sama seperti bank konvensional, pada bank syariah terdapat produk tabungan. Meski sama, tentu saja ada perbedaan yang ada pada tabungan syariah dimana tidak menggunakan sistem bunga. Berdasarkan Fatwa

---

<sup>65</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2005), h. 272.

<sup>66</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 79.

DSN nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa terdapat dua jenis tabungan yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

#### 1) Tabungan *Wadiah*

Kata *Wadiah* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti simpanan, yaitu penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara.<sup>67</sup> Adiwarmanto Karim sendiri berpendapat tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwasannya tabungan *wadiah* merupakan produk simpanan masyarakat pada bank yang hanya bersifat titipan semata. Oleh karena itu, pihak bank selayaknya tidak mempergunakan dana dari tabungan *wadiah* ini baik itu untuk investasi maupun kebutuhan operasional. Begitu juga sebaliknya, pihak nasabah tidak berhak mendapat tambahan (uang hasil investasi yang dilakukan pihak bank pada pihak tertentu) karena dana yang disetorkan nasabah hanya untuk dititipkan dan disimpan di bank saja untuk kemudian bisa dipergunakan sewaktu-waktu. Akan tetapi, pihak bank diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabahnya. Hal ini biasanya dilakukan mereka untuk menunjukkan apresiasi terhadap nasabah yang telah loyal menggunakan jasa bank tersebut. Tentu saja

---

<sup>67</sup> Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.85.

bonus yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya ini tidak ada sangkut pautnya terhadap transaksi investasi bank (*mudharabah*) terhadap pihak lain.

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Merujuk pada *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat diketahui bahwasannya *mudharabah* berarti usaha yang berisiko, yakni akad kerjasama usaha antar pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana yang mana keuntungan dibagi sesuai dengannisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Syafi'i Antonio berujar alasan diterapkannya tabungan *mudharabah* selain adanya peran pemilik modal (nasabah) dengan pengelola modal (bank), dikarenakan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, sebab dibutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan investasi.

Melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa produk tabungan *mudharabah* pada bank syariah bukan bersifat titipan semata, melainkan turut adanya kontrak kerjasama (dalam hal ini bagi hasil) antara pihak pemilik dana (nasabah) dengan pihak pengelola dana (bank). Oleh karena itu, melalui produk ini bank syariah dapat mempergunakan dananya untuk diinvestasikan kembali ke pihak tertentu untuk kemudian keuntungan dan kerugiannya ditanggung kedua belah pihak. Selain itu, sama seperti

tabungan *wadiah*, pada tabungan *mudharabah* pihak nasabah diperkenankan untuk melakukan penarikan kapan pun di waktu mereka membutuhkannya.

#### **b. Deposito**

Melihat Fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah harus berdasarkan akad *mudharabah*. Secara teori, deposito *mudharabah* tidak begitu jauh berbeda dengan tabungan *mudharabah*. Hanya saja, simpanan di bank penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu–waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak penyimpan dengan bank yang bersangkutan, sedangkan tabungan *mudharabah* tidak.<sup>68</sup>

Biasanya, waktu penyimpanan dana deposito dilakukan dalam periode bulanan sebagaimana deposito di bank konvensional. Maka dari itu, nasabah dapat melakukan penarikan dana hanya saat tanggal jatuh tempo. Pada tanggal yang bersamaan juga bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank dibagikan.<sup>69</sup>

#### **c. Giro**

Berdasarkan Undang – Undang no. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara

---

<sup>68</sup> Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, “Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992”, dalam Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 351.

<sup>69</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 149.

pemindahbukuan.<sup>70</sup> Jadi, melalui produk giro, nasabah memungkinkan melakukan perintah kepada pihak bank untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening yang dituju dalam surat tersebut.

Dalam Fatwa DSN nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa terdapat dua jenis giro berdasarkan prinsip syariah yang dibenarkan, yakni giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.

#### 1) Giro *Wadiah*

Pada Undang – Undang nomor 21 tahun 2008, pasal 1 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Sedangkan yang dimaksud dengan giro *wadiah* berdasarkan Fatwa DSN adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang diisyaratkan (kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank).<sup>71</sup>

Jadi, melalui penjelasan tersebut diketahui bahwa rekening nasabah bank penerima dapat melakukan penarikannya setiap saat melalui beberapa fasilitas, baik itu cek, bilyet giro atau pemindahbukuan. Hanya saja dana tersebut tidak berhak untuk dipergunakan oleh pihak bank

---

<sup>70</sup> Undang – Undang no. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 6, dalam Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodefikasi Produk Bank Indonesia* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 118.

<sup>71</sup> Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid I* (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), h.6.

mengingat sifat dan tersebut hanya sebuah titipan semata. Tetapi, pihak bank diperbolehkan untuk memberikan pemberian yang bersifat sukarela (bonus) sebagai bentuk apresiasi kepada nasabahnya yang selama ini telah setia menggunakan produk bank tersebut.

## 2) Giro *Mudharabah*

Hampir sama dengan giro *wadiah*, hanya saja bedanya pada giro *mudharabah* ini terlibat dua pihak, yaitu pemilik dana (nasabah) dan penghimpun / pengelola dana (bank) yang mana uang (modal) dalam giro *mudharabah* ini boleh untuk diinvestasikan kembali untuk kemudian hasil yang diperoleh dibagi untuk kedua belah pihak, sehingga produk giro disini bukan sekedar titipan semata.<sup>72</sup> Maka, dalam produk giro *mudharabah* ini terdapat dua pelaku, yaitu *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (penghimpun dana), serta adanya ketentuan nisbah antara kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Sehingga, dalam deposito *mudharabah* ini nasabah dapat melakukan penarikan sewaktu – waktu melalui fasilitas cek, bilyet giro, dan pemindah bukuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Bedanya, melalui produk ini pihak nasabah dimungkinkan memperoleh imbalan (bagi hasil) karena melalui produk giro

---

<sup>72</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.342.

*mudharabah* ini memungkinkan pihak bank untuk mempergunakan dana yang diperolehnya untuk diinvestasikan kembali.

### **3. Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Pembiayaan**

Secara teknis yang dimaksud dengan simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah, seperti: giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk menyalurkan pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka akan dapat meningkatkan peyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Seperti teori pembiayaan yang menyebutkan salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*financing*) adalah modal sendiri (*equity*), sehingga semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula. Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada Dana Pihak Ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), karena dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada masyarakat.



#### **D. *Capital Adequacy Ratio* (Kecukupan Modal)**

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

##### **1. Pengertian *Capital Adequacy Ratio***

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.<sup>73</sup> Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Modal merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan

---

<sup>73</sup> Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), h. 59.

aktiva bank yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat.

Modal bank terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyesuaian penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan *Aktiva Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR) yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing aktiva. ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Rasio ini dinyatakan sebagai persentase yang diukur dari kemampuan bank untuk menopang dirinya sendiri terhadap risiko kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko keuangan dan risiko operasional yang terkait dengan usahanya. Setiap negara memiliki nilai CAR berbeda dan

perlu dipertahankan. Menurut perjanjian internasional (perjanjian Basel), banyak negara sepakat untuk mempertahankan persentase CAR pada tingkat tertentu. Sebagai buntut dari resesi ekonomi, pembatasan tambahan dikenakan pada bank untuk memastikan bahwa mereka lebih terlindung dari risiko ekonomi ekstrim yang muncul secara berkala).

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{ATMR \times 100\%}$$

Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8%. Ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu standar *Bank for International Settlement* (BIS).

Berdasarkan definisi di atas dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank yang dapat digunakan dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang kegiatan atau operasional bank serta mengcover kerugian dari seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank.

Modal yang memadai akan membantu bank untuk dapat menyalurkan dana yang lebih besar kepada pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi pihak bank dari dana yang disalurkan.

#### **a. Fungsi Modal**

Bagi suatu bank, modal memiliki fungsi yang spesifik dibandingkan dengan perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah:<sup>74</sup>

1) Fungsi melindungi (*protective function*)

Bahwa modal berfungsi untuk melindungi kerugian para penyimpan/ penitip uang apabila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab pemegang saham.

2) Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga suatu kepercayaan menjadi aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Untuk itu dalam rangka mempertahankan, mengembangkan dan melindungi kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri.

3) Fungsi operasional (*operational function*)

Adanya modal membuat suatu bank dapat bekerja, dengan kata lain bank tidak dapat bekerja jika tidak ada modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin

---

<sup>74</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2012), h. 29-30.

pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan inventaris, sewa tempat serta pengeluaran lainnya yang harus dibayar dengan modal sendiri dan tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat.

- 4) Menanggung risiko kredit (*buffer to absorb occasional operating losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar dananya bersumber dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul suatu risiko di kemudian hari yakni jika nasabah tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Maka jika hal itu terjadi pihak bank yang harus menanggung risiko kerugian tersebut. Dalam hal ini modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

- 5) Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank, misalnya saham. Seperti yang telah dijelaskan bahwa modal adalah faktor penting bagi suatu bank dalam rangka mengembangkan usaha dan menanggung risiko yang dialami. Agar mampu berkembang dan bersaing secara kompetitif dan sehat maka sisi permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan BIS (*Bank for International Settlement*). BIS menentukan kewajiban modal minimum bank adalah berdasarkan pada risiko, termasuk dalam

risiko kredit.<sup>75</sup> Penilaian kuantitatif dan kualitatif dari faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap komponen berikut:<sup>76</sup>

- a) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- b) Komposisi permodalan;
- c) Tren kedepan/proyeksi KPMM; Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank;
- d) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- e) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- f) Akses kepada sumber permodalan; dan
- g) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

#### **b. Jenis-Jenis Modal Bank**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia melalui Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006, maka aspek permodalan bank syariah, adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Veitzhal Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N. Idroes. *Bank dan Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 709.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 709.

<sup>77</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 281.

### 1. Modal inti (*tier 1*)

Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah 5% (lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.<sup>78</sup> Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak. Secara rinci, modal inti dapat berupa:<sup>79</sup>

- a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham;
- b) Agio saham, yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan;
- c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan;
- d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian/anggaran dasar masing-masing bank;
- e) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang

---

<sup>78</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 70.

<sup>79</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 281.

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

- f) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.<sup>80</sup>
- g) Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya dengan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- h) Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak. Apabila pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi pengurang bagi modal inti.
- i) Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan oleh rapat umum pemegang saham dan atau pengesahan dari instansi yang berwenang. Adapun yang menjadi pengurang bagi modal inti, yaitu *good will* yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyesihan penghapusan

---

<sup>80</sup> Khaerul Umam, *op.cit*, h. 252.



aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>81</sup>

## 2) Modal pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Adapun rincian modal pelengkap dapat berupa:<sup>82</sup>

- a) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah membuat persetujuan direktor jenderal pajak.
- b) Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung kemungkinan timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c) Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
- d) Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI, yaitu pinjaman yang didukung dengan instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri:<sup>83</sup>

(1) Berdasarkan prinsip *qardh*.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 252.

<sup>82</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 34-35.

<sup>83</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 283.

- (2) Tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh.
  - (3) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
  - (4) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
- e) Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>84</sup>
- (1) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - (2) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
  - (3) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank syariah harus mengajukan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
  - (4) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  - (5) minimal berjangka waktu lima tahun;
  - (6) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat;
  - (7) hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

modal). Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.<sup>85</sup>

### 3) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*)

Modal ini terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek. Adapun modal pelengkap tambahan terdiri dari:<sup>86</sup>

- a) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*<sup>87</sup>
- b) Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek;
- c) Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko Operasional, namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap; dan
- d) Bagian dari modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang melebihi batasan pelengkap modal bawah (*lower tier 2*).

Sebelum mengadakan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) tersebut, maka modal pelengkap tambahan (*tier 3*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a) Diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b) Memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 2 (dua) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 284.

<sup>86</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 72.

<sup>87</sup> Bambang, *op.cit*, h. 284.

<sup>88</sup> *Ibid*.

c) Tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian, pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antarperiode (*cummulative*), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo.

Dalam hal faktor permodalan, semua bank diwajibkan untuk memenuhi tingkat kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio* -CAR) yang memadai untuk dapat menjaga likuiditasnya. Untuk menghitung rasio CAR maka terlebih dahulu harus diketahui nilai dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100% . Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.<sup>89</sup> *Capital adequacy ratio* merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur tingkat kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* pada bank, dapat digunakan rumus, yakni:<sup>90</sup>

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)} \times 100\%}$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip

---

<sup>89</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.251.

<sup>90</sup> Veitzhal Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N. Idroes. *Bank dan Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 712.

Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.<sup>65</sup> Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut maka bank yang dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8% .

## **2. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan**

CAR adalah ratio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan faktor internal dalam bank dalam menentukan penyaluran kredit perbankan. Jika CAR tinggi maka akan meningkatkan sumber daya finansial untuk pengembangan usaha perusahaan, dan mengantisipasi kerugian yang akan diterima dari penyaluran jumlah kredit. Jumlah CAR yang tinggi akan membuat kepercayaan diri pada bank dalam melakukan penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika kecukupan modal yang dimiliki suatu bank tinggi maka jumlah penyaluran kredit yang diberikan dapat meningkat.

## **E. *Non Performing Financing* (NPF)**

### **1. Pengertian *Non Performing Financing***

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai

pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Financing*(NPF). Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:<sup>91</sup>

- a) Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian haribagi bank dalam arti luas.
- c) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baikdalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga,denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabahyang bersangkutan.
- d) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabilasumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidakcukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhitarget yang diinginkan oleh bank.
- e) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuaiperjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>91</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 475

g) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, BI menginstruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai surat edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan Rasio Keuangan Bank yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah**

No.	Nilai NPF	Predikat
1.	$\text{NPF} = 2\%$	Sehat
2.	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

**Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).**

Menurut Syafi'i Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan

kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.<sup>92</sup>

## **2. Hubungan *Non Performinf Financing* (NPF) dengan Pembiayaan**

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*). Semakin tinggi *Non Performance Financing* maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank tersebut. Rasio *NonPerformance Financing* (NPF) pada bank yang tinggi dapat mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana yang tersedia di bank berkurang maka juga berdampak pada pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang otomatis akan berkurang.

## **F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Definisi UMKM**

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>93</sup> Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

---

<sup>92</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Loc.Cit.

<sup>93</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 1



bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>94</sup> Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>95</sup>

## **2. Kriteria UMKM**

Berdasarkan rumusan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 1-3 menurut UU ini yang dimaksud usaha kecil, mikro dan menengah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok adalah sebagai berikut:

### **a. kriteria usaha mikro**

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>94</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2

<sup>95</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil , Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 2

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau<sup>96</sup>
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)<sup>97</sup>

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 1.

<sup>97</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 2.

<sup>98</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 6 ayat 3.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria UMKM**

NO.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1.	USAHA MIKRO	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2.	USAHA KECIL	>500 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3.	USAHA MENENGAH	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

**Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)**

### **3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara – negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara – negara maju (NM). Di Negara sedang berkembang, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di Negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Di Negara sedang berkembang khususnya di Asia, Afrika, Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber dari pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan.<sup>99</sup>

Di dalam literature diakui secara luas bahwa di Negara sedang berkembang, UMKM sangat penting karena karakteristik – karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar, yakni:<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu – isu penting cet ke-1* (Jakarta : LP3ES, 2012), h. 1.

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 2.

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh pelosok perdesaan, termasuk di wilayah – wilayah yang relative terisolasi.
- b. Karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukan sebagai elemen penting dari kebijakan national untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

#### **4. Masalah – masalah Utama UMKM**

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan – hambatan tersebut (atau intensitasnya) bias berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. Rintang – rintangan yang umum tersebut adalah :

- a. Keterbatasan modal kerja
- b. Keterbatasan investasi
- c. Kesulitan dalam pemasaran
- d. Distribusi dan pengadaan bahan baku
- e. Kualitas SDM rendah

f. Keterbatasan teknologi

Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran dan rendahnya produktivitas di UMKM di Indonesia dan di Negara sedang berkembang umumnya adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

## 5. UMKM dalam Perspektif Syariah

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin, adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (reziko). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rizki yang besar. Kata rizki memiliki makna bersayap, rezeki sekaligus reziko. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, istrinya dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang dan *entrepre* mancanegara yang pawai. Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental *entrepreneurship inherent* dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Bukanlah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke

seluruh dunia setidaknya sampai abad ke -13 M, oleh para pedagang muslim.<sup>101</sup>

Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, Nabi dan sebagian besar sahabat telah meubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan. Keberadaan Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang. Di samping menyebarkan ilmu agama, para pedagang ini juga mewariskan keahlian berdagang khususnya kepada masyarakat pesisir. Di wilayah Pantura, misalnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki basis keagamaan yang kuat, kegiatan mengaji dan berbisnis sudah menjadi satu istilah yang sangat akrab dan menyatu sehingga muncul istilah yang sangat terkenal jigang (ngaji dan dagang). Sejarah juga mencatat sejumlah tokoh Islam terkenal yang juga sebagai pengusaha tangguh, Abdul Ghani Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan, Perpatih, Jhohan Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semito, dan Rahman Tamin. Apa yang tergambar di atas, setidaknya dapat menjadi bukti nyata bahwa etos bisnis yang dimiliki oleh umat Islam sangatlah tinggi, atau dengan kata lain Islam dan berdagang ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, “Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rizki” Jika ditinjau dari asal katanya, Entrepreneurship merupakan istilah bahasa perancis yang memiliki arti ‘*between taker*’ atau

---

<sup>101</sup> <http://wirausahenet.tripod.com/> diakses pada 3 juni 2018, pukul 21.42 wib.

'*go-between*'. Contoh yang sering digunakan untuk menggambarkan pengertian '*gobetween*' atau 'perantara' ini adalah pada saat Marcopolo yang mencoba merintis jalur pelayaran dagang ke timur jauh.

Untuk melakukan perjalanan dagang tersebut, Marcopolo tidak menjual barangnya sendiri. Dia hanya membawa barang seorang pengusaha melalui penandatanganan kontrak. Dia setuju menandatangani kontrak untuk menjual barang dari pengusaha tersebut. Dalam kontrak ini dinyatakan bahwa si pengusaha memberi pinjaman dagang kepada Marcopolo. Dari penjualan barang tersebut, Marcopolo mendapat bagian 25%, termasuk asuransi. Sedangkan pengusaha memperoleh keuntungan lebih dari 75%. Segala macam resiko dari perdagangan tersebut ditanggung oleh pedagang, dalam hal ini Marcopolo. Jadi, pada masa itu wiraswasta digambarkan sebagai usaha, dalam hal contoh ini perdagangan, yang menggunakan modal orang lain, dan memperoleh bagian ( yang lebih kecil daripada pemilik modal ) dari usaha tersebut. Di sini, segala resiko usaha tersebut menjadi tanggungan wiraswastawan. Pemilik modal tidak menanggung resiko apa pun. Jika kita ikuti perkembangan makna pengertian *entrepreneur*, memang mengalami perubahan-perubahan. Namun, sampai saat ini, pendapat Joseph Schumpeter pada tahun 1912 masih diikuti banyak kalangan, karena lebih luas. Menurut Schumpeter, seorang *entrepreneur* tidak selalu seorang pedagang (*businessman*) atau seorang manager; ia adalah orang yang unik yang berpembawaan pengambil resiko dan yang memperkenalkan produk-produk inovatif dan teknologi baru ke

dalam perekonomian. Namun secara pribadi, *entrepreneur* menurut saya adalah seorang yang memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi atas usahanya tersebut. Namun perlu diingat bahwa pengertian dari *entrepreneurship* memang terlihat lebih mudah dari padajika anda melaksanakannya langsung.

UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang, Berusaha atau berdagang suatu anjuran kepada umat islam. Menurut penulis, Allah menciptakan Rasul Nya sebagai pedagang adalah suatu sindiran keras kepada ummat-Nya agar meniru Rasulullah. Berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. Buktinya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sendiri adalah pedagang dan beliau memuji serta mendoakan para pedagang yang jujur. Rasulullah adalah pedagang ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa modal dari Khadijah *radhiallahu'anha* yang ketika itu belum menjadi istri beliau. Ibnu Ishaq berkata: “Khadijah binti Khuwailid ketika itu adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta dan juga kedudukan terhormat. Ia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan usahanya dengan sistem mudharabah (bagi hasil) sehingga para pekerjanya pun mendapat keuntungan. Ketika itu pula, kaum Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang. Tatkala Khadijah mendengar tentang Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* (yang ketika itu belum diutus menjadi Rasul,



pent.) mengenai kejujuran lisannya, sifat amanahnya dan kemuliaan akhlakunya, maka ia pun mengutus orang untuk menemui Rasulullah. Khadijah menawarkan beliau untuk menjual barang-barangnya ke negeri Syam, didampingi seorang pemuda budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah pun memberi imbalan istimewa kepada beliau yang tidak diberikan kepada para pedagang lainnya. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu dan lalu berangkat dengan barang dagangan Khadijah bersama budaknya yaitu Maisarah sampai ke negeri Syam”<sup>102</sup>

Para sahabat Nabi adalah pedagang mungkin kita semua ingat kisah ‘Abdurrahman bin ‘Auf radhiallahu’anhun, bagaimana kehebatan beliau dalam berdagang,

قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقْطٍ وَسَمْنٍ

Artinya: “Abdurrahman bin Auf ketika datang di Madinah, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar Rabi' Al Anshari. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman wanita untuk dinikahi dan juga harta. Namun Abdurrahman berkata: 'semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tapi cukup tunjukkan kepadaku dimana letak pasar'. Lalu di sana ia mendapatkan untung berupa aqith dan minyak samin” (HR Al Bukhari 3937).<sup>103</sup>

Dan juga para sahabat Nabi yang lain, banyak yang merupakan pedagang. Abu Bakar radhiallahu'anhun adalah pedagang pakaian. Umar radhiallahu'anhun pernah berdagang gandum dan bahan makanan pokok.

‘Abbas bin Abdil Muthallib radhiallahu'anhun adalah pedagang. Abu

---

<sup>102</sup> Al-Muafiri, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Terbitan: (2004), *Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisyam Ibnu Hisyam* (Pandeglang: Ar Rahiqul Makhtum, 2004), h. 187-188.

<sup>103</sup> Syekh H. Abdul halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Sufyan *radhiallahu 'anhu* berjualan udm (camilan yang dimakan bersama roti).<sup>104</sup> Sudah seharusnya peran dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan segala keterbatasannya mendapat apresiasi dari pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro kepada UMKM. Kebijakan yang benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, bukan hanya sebuah retorika yang selalu menjadi angin surga dan komoditas politik ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Sebab UMKM sudah terbukti menjadi penopang ekonomi bangsa kita. Sejarah membuktikan ketika hantaman badai krisis melanda Indonesia tahun 1998, perusahaan konglomerat berguguran satu persatu, tapi UMKM mampu bertahan dan memberi kontribusi besar pada penyelamatan ekonomi bangsa ini.

Membangun UMKM harusnya menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Membangun kemandirian UKM adalah sebuah kewajiban. Ada berapa alasan dan referensi yang mewajibkan kita harus melaksanakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang

---

<sup>104</sup> Al Bayan Fi Madzhab Asy Syafi'i, *Kajian Hadits Kontemporer* (Bandung: Ar Rahiquil Makhtum, 2002), h. 10.

*diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr : 7).*<sup>105</sup>

Menurut para pakar, disebutkan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah – bawah, yang notabene mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan; “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara kalian”. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University, AS, di sejumlah negara, ternyata ditegaskan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga didalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.<sup>106</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Pengaruh DPK, CAR, dan NPF Terhadap Pembiayaan UMKM.

---

<sup>105</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 546.

<sup>106</sup> M. Umer Chapra. *Islamic and Economic Development*. (Yogyakarta: Media Persindo, 2009), h. 21.

1. Pada tahun 2011 telah ditulis skripsi atas nama Irma Anindita dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010). Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan bahwa CAR, LDR, NPL dan Suku Bunga dengan uji F berpengaruh secara signifikan. Hasil secara parsial dengan uji t, diperoleh hasil bahwa variabel CAR, NPL dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM dengan tingkat signifikansi 0,000 dan 0,035, sedangkan variabel LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.<sup>107</sup> **Persamaan** dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penyaluran pembiayaan UMKM. **Perbedaan** dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menganalisis tingkat suku bunga, CAR, NPL, dan LDR. Sedangkan penelitian ini meneliti variabel DPK, CAR dan NPF.
2. Pada tahun 2016 telah ditulis jurnal atas nama Rina Destiana dengan judul Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada perbankan syariah adalah DPK dan likuiditas, sedangkan faktor lain seperti modal, laba dan risiko tidak memiliki signifikansi pada pembiayaan UMKM. **Persamaan** dalam

---

<sup>107</sup> Irma Anindita, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010)" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

penelitian ini ialah sama-sama menganalisis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). **Perbedaan** dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor internal.<sup>108</sup>

3. Pada Tahun 2004 telah ditulis skripsi atas nama Cokro Wahyu Sujati dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK) Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004-2007. Hasil dari penelitian ini, bahwa jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi KUK. Pada tingkat suku bunga deposito ternyata variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume alokasi KUK, dan tingkat laju inflasi di Indonesia ternyata berpengaruh negatif signifikan terhadap volume alokasi KUK.<sup>109</sup> **Persamaan** dalam penelitian ini ialah sama-sama menganalisis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya, hanya saja pada bank umum konvensional lebih dikenal dengan Kredit Usaha Kecil. **Perbedaan** dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi KUK dengan parameter variabel independen yakni Jumlah DPK, Inflasi, dan Suku Bunga Riil Pinjaman, sedangkan pada penelitian ini variabel independennya yakni DPK, CAR dan NPF.

---

<sup>108</sup> Rina Destiana, "Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia", *JRKA*, Vol. 2 Isue 1 (Februari 2016).

<sup>109</sup> Cokro Wahyu Sujati (2004), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Padatahun2004-2007)", skripsi UIIS Yogyakarta, 2007.

4. Telah ditulis jurnal atas nama Wuri Arianti dan Harjum Muharam dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, dapat dilihat dengan uji F dengan nilai 0,000 lebih kecil dari 5%. Dapat diprediksi dari empat variabel terhadap pembiayaan adalah 98,9% yang ditunjukkan oleh adjusted R<sup>2</sup> sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. **Persamaan** dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK). **Perbedaan** dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan pada Perbankan Syariah.<sup>110</sup>
5. Pada tahun 2011 telah dilakukan penelitian oleh Tito Aditya Galih. Penelitiannya menguji Pengaruh DPK, CAR, NPL ROA dan LDR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank di Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa DPK, ROA dan LDR berpengaruh positif signifikan. Sedangkan CAR dan NPL tidak berpengaruh signifikan

---

<sup>110</sup> Wuri Arianti dan Harjun Muharam, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)".

terhadap jumlah penyaluran kredit.<sup>111</sup> . **Persamaan** dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyaluran pembiayaan. **Perbedaan** dalam penelitian ini ialah variabel yang diteliti yakni DPK, CAR dan NPF.

#### **H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk sementara waktu benar agar dapat ditarik suatu konsekuensi yang logis dan melalui cara ini kemudian diadakan pengujian (*testing*) mengenai kebenarannya dengan menggunakan data empiris (*empirical data*) hasil penelitian.<sup>112</sup> Dengan kata lain, hipotesis adalah pernyataan yang menjadi arah penelitian yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui suatu pengujian dari data penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan, adalah:

##### **1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya dalam jurnal, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>113</sup> Dalam jurnal Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya menurut teori Syafi'I Antonio salah satu

---

<sup>111</sup> Tito Aditya Galih , “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank di Indonesia”, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

<sup>112</sup> Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, Cet. Kedua Edisi Ketujuh, 2003), h. 49.

<sup>113</sup> Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal ekonomi, Vol 4 No. 1 (Januari-juni 2015), h. 91.

sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan.<sup>114</sup> Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka pembiayaan akan meningkat pula. Menurut Rina Destiana dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM.<sup>115</sup> Menurut Wuri arianti dan Harjum Muharam dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Menurut Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia” dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>116</sup> Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

---

<sup>114</sup> Muhammad Antonio Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>115</sup> Rina Destiana, *Loc.Cit.*, h. 15.

<sup>116</sup> Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *SHARE*, Vol. 4 No. 1 (Januari - Juni 2015).



1.  $H_0$ : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2.  $H_1$ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## **2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang mengukur tingkat modal yang dimiliki bank. Modal yang kuat akan memberikan peluang yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, nantinya dari pembiayaan yang diberikan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan akan dibagikan kepada nasabah simpanan. Dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi rasio CAR pada bank maka dalam menyalurkan pembiayaan akan semakin baik, karena dana yang disalurkan terutama pada sektor riil akan dapat menghasilkan keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati. Hal tersebut menandakan bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap alokasi pembiayaan bank syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Gedhe Meydianawathi. Hasil penelitiannya bahwa secara variabel, DPK, ROA dan CAR dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja Bank Umum kepada sektor UMKM

di Indonesia.<sup>117</sup> Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1.  $H_0$ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2.  $H_2$ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam jurnalnya menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank atau semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, apabila tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Luh Gedhe Meydianawathi, "*Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*", Skripsi Universitas Udayana Denpasar Bali, 2006.

<sup>118</sup> Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), h. 7

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa apabila Non performing Financing rendah maka penyaluran pembiayaan akan tinggi. Sebaliknya jika NPF tinggi maka penyaluran pembiayaan akan rendah. Menurut Wuri Arianti dan Harjum Muharam dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)” dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Menurut Novia Nurbiaty dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015” dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>119</sup>

Menurut Nurimansyah Setivia Bakti dalam jurnal yang berjudul “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah” dapat disimpulkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1.  $H_0$  : *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

---

<sup>119</sup> Novia Nurbiaty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015”, JOM Fekon, Vol 4 No. 1 (Februari 2017).

2. H<sub>3</sub>: *Non Performing Financing* (NPF) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## I. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berpikir di atas penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X (dana pihak ketiga *capital adequacy ratio* dan *non performing financing*) terhadap variabel Y (Alokasi pembiayaan UMKM) sehingga dari kerangka berpikir di atas dapat dibuat menjadi hipotesis penelitian.

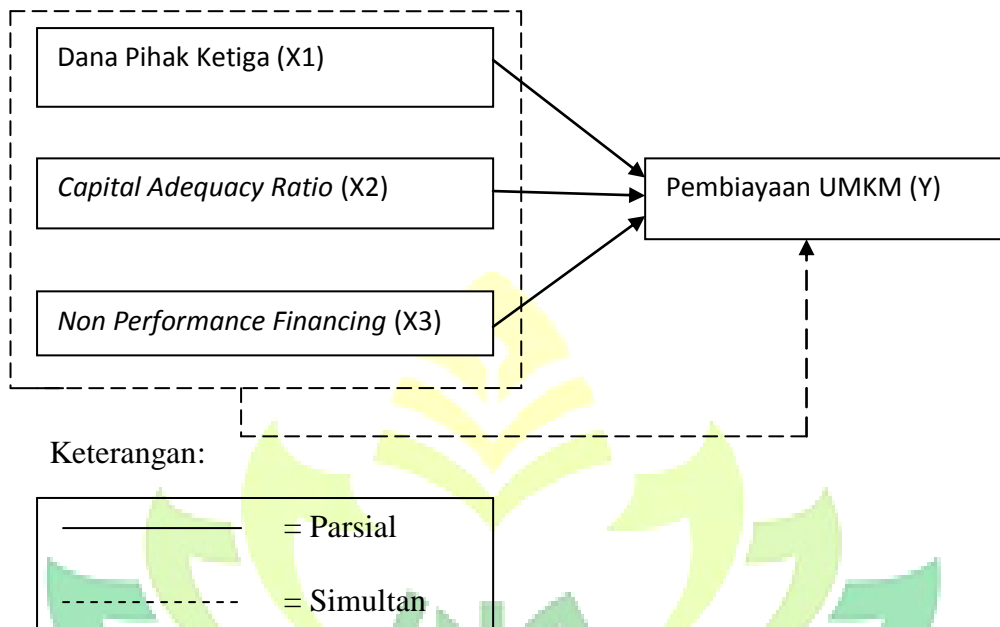
Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam skema diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam teori Syafi'I Antonio mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan. Karena Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu simpanan yang mempengaruhi terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang mengukur tingkat modal yang dimiliki bank. Modal yang kuat akan memberikan peluang yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, nantinya dari pembiayaan yang diberikan

tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan akan dibagihasilkan kepada nasabah simpanan. Dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi rasio CAR pada bank maka dalam menyalurkan pembiayaan akan semakin baik, karena dana yang disalurkan terutama pada sektor riil akan dapat menghasilkan keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati. Hal tersebut menandakan bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap alokasi pembiayaan bank syariah. Hal ini didukung dengan penelitian dari Sri Windarti, Kartika dan Pupik yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank dengan indikator penyaluran pembiayaan umkm.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator dari penilaian risiko pembiayaan bank, dimana risiko tersebut terjadi akibat kegagalan nasabah mengembalikan cicilan pokok, bagi hasil ataupun keuntungan terhadap pihak bank. Itu artinya jika rasio NPF tinggi maka risiko pembiayaan juga akan tinggi dan penyaluran pembiayaan suatu bank akan menurun. Hal tersebut menandakan bahwa NPF memiliki pengaruh yang negatif terhadap alokasi pembiayaan umkm bank syariah. Hal ini didukung dengan penelitian Ferly Ferdyant yang menemukan bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan uraian dari landasan teori diatas maka dapat peneliti gambarkan, kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang di olah dengan menggunakan analisis statistik.<sup>120</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari laporan statistik dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan. Penulis menggali data yang bersumber dari laporan statistik perbankan syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan dengan runtut waktu perbulan Bank Umum Syariah periode 2015-2017.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

---

<sup>120</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 12.

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>121</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-angka baik yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data kualitatif sendiri adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam satuan angka.<sup>122</sup>

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian menggunakan data *Time Series*. *Time Series* adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu (misal: hari, minggu, bulan, tahun).<sup>123</sup> Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa laporan statistik perbankan syariah tahun 2015-2017.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

---

<sup>121</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 7.

<sup>122</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

<sup>123</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 39.



langsung melalui media perantara (data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>124</sup>

Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan statistik perbankan syariah sebagai data dalam penyaluran pembiayaan, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur-literatur yang relevan dengan bahasan penulis.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhitung dan subjeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.<sup>125</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan statistik perbankan syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>126</sup> Adapun cara untuk

---

<sup>124</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE Cetakan Keenam, 2014), h. 147.

<sup>125</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013), h. 183.

<sup>126</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 81.

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penentuan sampel ini berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi. Populasi Dari 3 macam Perbankan Syariah di Indonesia yakni Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Peneliti memilih Bank Umum Syariah karena total assetnya yang lebih besar.

Dari penjelasan populasi di atas sehingga sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi tersebut adalah laporan statistik perbankan syariah khusus bank umum syariah yang diambil runtut waktu perbulan dari tahun 2015-2017. Jadi sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel dari laporan bulanan statistik perbankan syariah khusus bank umum syariah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, jurnal, majalah dan lain sebagainya.<sup>127</sup>

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain, yakni berupa laporan Statistik Perbankan Syariah bulanan tahun 2015-2017 yang dipublikasikan melalui situs resmi SPS OJK dan Bank Indonesia.

---

<sup>127</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis* .... h. 329.

## E. Definisi Operasional Penelitian

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>128</sup> Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.<sup>129</sup> Variabel terikat dalam penelitian ini berupa pembiayaan yang proksikan dengan penyaluran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>130</sup>

### 2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>131</sup>

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yakni:

---

<sup>128</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61.

<sup>129</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, Edisi Pertama, 2002), h. 63.

<sup>130</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 92.

<sup>131</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61.

- a. Variabel X1 adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yakni dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Data diperoleh dari laporan keuangan Perbankan Syariah pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Variabel X2 adalah tingkat kecukupan modal yang diukur dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian di dalam per Kredit atau dalam perdagangan surat-surat berharga.<sup>132</sup> menurut Lukman Dendawijaya,<sup>133</sup> CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan sebagainya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang mempunyai risiko.

---

<sup>132</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 342.

<sup>133</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 122.

c. *Non Performing Financing* (NPF) (X3) yaitu rasio yang menunjukkan tingkat resiko pembiayaan bermasalah, yakni resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>134</sup> Melalui rasio NPF maka dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pula risiko tidak tertagihnya piutang terhadap pinjaman yang diberikan dan akan berdampak terhadap menurunnya keuntungan bank.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan jumlah pembiayaan UMKM yang di salurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan tersebut dipengaruhi oleh DPK, CAR dan NPF. Adapun definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel berikut:

---

<sup>134</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 55.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Skala Pengukur (Indikator)
Dana Pihak ketiga	Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki akan dosalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.	Simpanan DPK $= \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{Total Asset}}$
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal bank yang dihitung dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	CAR $= \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank, atau bisa juga dikatakan jumlah dana pembiayan bermasalah yang tidak mampu dibayarkan oleh pihak peminjam kepada pihak perbankan dari total dana pembiayaan yang berhasil di salurkan lepada masyarakat, dan dinyatakan dalam persen.	NPF $= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	UMKM yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	Miliar (Rp)

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan di analisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*.<sup>135</sup> Uji *Kolmogrov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : data residual berdistribusi normal

$H_a$  : data residual tidak berdistribusi normal.

Artinya apabila nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  menunjukkan data tersebut terdistribusi secara tidak normal. sebaliknya apabila nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  artinya data tersebut terdistribusi secara normal.

#### b. Heterokedositas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.<sup>136</sup> Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut *Homokedastisitas* dan jika berbeda *Heterokedastisitas*. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji *scatterplot*

---

<sup>135</sup> Noor, Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 47.

<sup>136</sup> Santoso, *Aplikasi SPSS Pada Statistic Multivariant*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 36.

*regresi* yaitu dengan melihat titik sebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Apabila model regresi sesuai dengan kriteria yang ada maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah Heterokedastisitas.

c. Autokorelasi

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi data pada masa-masa sebelumnya. salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Runs* (*Runs Test*). Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *Asymp. Sig* atau probabilitas diatas 0,05. <sup>137</sup>.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan korelasi antara variabel independen yang kuat/tinggi.<sup>138</sup> Pendeteksian terhadap multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari hasil analisis regresi. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.<sup>139</sup> Multikolinearitas terjadi jika nilai

---

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>138</sup> Noor, *op.cit*, h. 63.

<sup>139</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-Tujuh, 2013), h. 105.



$tolerance < 0,10$  atau samadengan  $VIF > 10$ . Jika  $VIF > 10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi lancar berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:<sup>140</sup>

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

$$Y = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 CAR + \beta_3 NPF + e \dots$$

Keterangan :

$Y$  = Variabel dependen (Pembiayaan UMKM)

$X_1$  = Variabel independen (DPK)

$X_2$  = Variabel independen (CAR)

$X_3$  = Variabel independen (NPF)

$\alpha$  = Konstanta yaitu (nilai  $Y$  bila  $X_1, X_2, X_3 = 0$ )

$\beta$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

$e$  = Error

---

<sup>140</sup> Moh. Pabundu Tika, *op.cit*, h. 94.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam meakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan nama Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Selain itu koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabelm X).

Uji koefisien determinasi dimana nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen.<sup>141</sup> Namun, model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.<sup>142</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted*  $R^2$  untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Koefisien *Adjusted* determinasi ( $\Delta R^2$ ) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Dengan pengukran koefisien determinasi ini akan dapat diketahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh

---

<sup>141</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-Tujuh, 2013), h. 97.

<sup>142</sup> *Ibid*,

faktor lain diluar model. Koefisien *Adjusted* determinasi ( $\Delta R^2$ ) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien *Adjusted* determinasi ( $\Delta R^2$ ) ini berkisar antara  $0 < \Delta R^2 < 1$ .<sup>143</sup> Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.<sup>144</sup> Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (DPK, CAR dan NPF) terhadap variabel dependen (Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah).

#### 4. Uji Hipotesis

Adapun uji hipotesis dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Dalam menguji variabel independen terhadap variabel dependen pada uji F yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

---

<sup>143</sup> Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, (Yogyakarta:Media Pressindo,2009), h. 21.

<sup>144</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivaraite dengan program BM SPSS 19, Edisi 5* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 97.

- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Selain itu uji F dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikan dan nilai  $\alpha = 5\%$  dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>145</sup>

- 1) Jika nilai  $Sig > \alpha$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai  $Sig < \alpha$  maka  $H_a$  diterima

b. Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen.<sup>146</sup> Uji t dapat dilaksanakan dengan langkah membandingkan t hitung dengan t tabel dengan derajat kebebasan 5%.

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.98.

- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha = 0,05$  (5%). Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:<sup>147</sup>

- 1) Jika nilai sig.  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai sig.  $< \alpha$  maka  $H_a$  diterima

Atau Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika nilai Sig  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima

Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1$ : Ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

---

<sup>147</sup> Imam Ghozali, *op.cit*, h. 96.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia**

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- . Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan

konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur



penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Sejarah tersedia di Statistik Perbankan Syariah ( *online* ) [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) di lihat pada Tanggal 21 Juli 2018.

## B. Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Analisis statistik deskriptif pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bank Umum Syariah selama tahun 2015 sampai dengan 2017.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedangkan variabel independennya Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF).

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Maximum	Minimum
DPK	36	12,1516	0,13360	12,38	12,00
CAR	36	15,5486	1,00476	17,91	14,09
NPF	36	5,0875	0,44271	6,17	4,41
UMKM	36	12,0047	0,09216	12,15	11,89

**Sumber: Data sekunder yang diolah oleh SPSS 23, 2018.**

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat jumlah 36 sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. UMKM sebagai variabel dependen memiliki rata-rata (mean) sebesar 12,0047 dan nilai standar deviasi sebesar 0,09216 dengan nilai minimum 11,89 dan nilai maximum 12,15.

Pada variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan nilai terkecil (*minimum*) 12,00 sedangkan nilai maksimum 12,38, nilai standar deviasi sebesar 0,13360 dan nilai rata-rata 12,1516.

Pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa terdapat jumlah 36 sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tabel diatas menunjukkan bahwa CAR pada data perbulan selama periode 2015-2017 memiliki nilai terkecil (*minimum*) sebesar 14,09% yang terdapat pada bulan Desember tahun 2015, sedangkan untuk nilai terbesar (*maksimum*) sebesar 17,91% yakni pada bulan Desember tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) yang dimiliki CAR adalah sebesar 15,5486 dan memiliki standar deviasinya sebesar 1,00476. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel CAR tidak terlalu besar, dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum dan minimum pada CAR.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF), pada tabel diatas menunjukkan bahwa NPF pada data perbulan selama periode 2015-2017 memiliki nilai minimum sebesar 4,41% yang terdapat pada bulan September periode 2017, sedangkan untuk nilai maksimum NPF sebesar 6,17% yakni pada bulan Mei tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) yang

dimiliki NPF adalah 5,0875 dengan standar deviasi 0,44271. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel NPF tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum dan minimum pada NPF.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas menggunakan SPSS 23.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

Sampel	Kolmogorov-Smirnov	Signifikansi	Keterangan
36	0,073	0,200	Normal

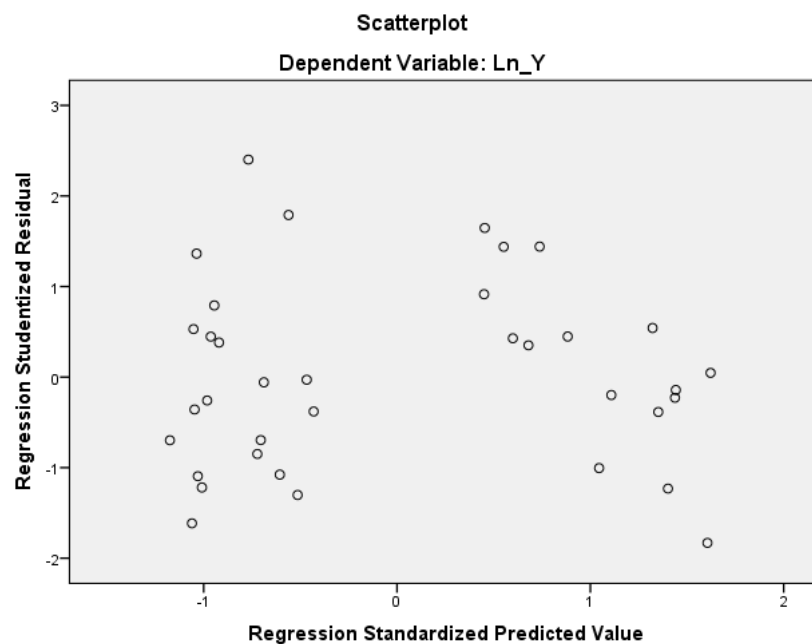
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka sebesar 0,073 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,200. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi. Data tabel uji normalitas di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih

besar dari  $\alpha = 0,05$ , artinya bahwa data variabel independen berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heterokedastisitas. Heterokedastisitas menyebabkan penaksiran atau estimator menjadi sangat tinggi untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplot regresi*.



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan kriteria *scatterplot regresi* diketahui bahwa:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dari kriteria *scatterplot regresi* di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, karena model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi dan sesuai dengan kriteria.

#### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi data pada masa-masa sebelumnya. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Runs (Runs Test)*. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai *Asymp. Sig* atau probabilitas diatas 0,05. Hasil uji *Runs Test* ditunjukkan dengan tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Uji Autokorelasi**

Sampel	Runs Test	Keterangan
36	0,063	Tidak terjadi autokorelasi

**Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 23, 2018.**

Hasil uji autokorelasi dengan model *Runs Test* menunjukkan angka sebesar 0,063, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 36. Berdasarkan ketentuan uji *Runs Test* yang apabila nilai probabilitas (*Asymp Sig.*) > dari 0,05 maka dapat dinyatakan data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
DPK	0,180	5,554	Tidak terjadi multikolinearitas
CAR	0,202	4,958	Tidak terjadi multikolinearitas
NPF	0,459	2,180	Tidak terjadi multikolinearitas

**Sumber: Data sekunder yang diolah oleh SPSS 23, 2018.**

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan oleh tabel 4.4 dengan melihat nilai *tolerance* atau *VIF* (*variance inflation factor*). Penelitian ini menggunakan variabel DPK, CAR dan NPF. Nilai *VIF* dari variabel independen DPK sebesar 5,554, CAR sebesar 4,985 dan NPF

sebesar 2,180. Nilai-nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

## C. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian regresi linier berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara DPK, CAR dan NPF terhadap alokasi pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah. Adapun hasil yang digunakan dari uji regresi linier berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Prediksi	Koefisien	$t_{hitung}$	Signifikansi	Kesimpulan
(Constant)		3,918	11,145	0,000	
UMKM					
DPK	Positif	0,679	21,506	0,000	Diterima
CAR	Positif	-0,005	-1,351	0,186	Ditolak
NPF	Negatif	-0,017	-2,832	0,008	Diterima
Fhitung = 871,962					
Signifikansi = 0,000					
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,987					

**Sumber: Data sekunder yang diolah oleh SPSS 23, 2018.**

Hasil persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.5. berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian ini maka persamaan model regresi yang diperoleh adalah:



$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

$$Y = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 CAR + \beta_3 NPF + e \dots$$

$$UMKM = 3,918 + 0,679DPK - 0,005CAR - 0,017NPF$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta 3,918 menyatakan bahwa jika variabel DPK, CAR dan NPF dianggap konstan, maka rata-rata alokasi pembiayaan UMKM adalah sebesar 3,918. Sementara itu, persamaan regresi tersebut mempunyai makna beberapa hal dibawah in:

- a. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap UMKM dikarenakan nilai signifikansi DPK sebesar 0,000 lebih kecil dibanding nilai  $\alpha = 0,05$  dan koefisien DPK 0,679. menggambarkan bahwa DPK mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Artinya, setiap kenaikan 1 point DPK, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, akan meningkatkan pembiayaan sebesar 67,9%.
- b. Koefisien regresi pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X2) sebesar -0,005 dengan signifikansi 0,186 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  menggambarkan bahwa CAR mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Artinya, setiap kenaikan 1 point CAR dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, akan menurunkan pembiayaan UMKM sebesar 0,5%.
- c. Koefisien regresi pada variabel *Non Performing Financing* (NPF) (X3) Sebesar -0,017 dengan signifikansi 0,008 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menggambarkan bahwa NPF mempunyai hubungan

yang negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Artinya, setiap kenaikan 1 point NPF dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, akan menurunkan alokasi pembiayaan UMKM 0,17%.

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>149</sup>

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.<sup>150</sup> dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh nilai sebesar 0,987 atau 98,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 98,7% variasi UMKM dapat dijelaskan oleh variabel DPK, CAR dan NPF. Sedangkan sisanya ( $100\% - 98,7\% = 1,3\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

---

<sup>149</sup> Imam Ghazali, *op.cit.* h, 97.

<sup>150</sup> *Ibid.*

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Berdasarkan uji ANOVA atau uji F yang dilakukan pada variabel DPK, CAR dan NPF terhadap pembiayaan UMKM, didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 871,962 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,90 ( $df_1 = k - 1, 4 - 1 = 3$ ) sedang ( $df_2 = n - k, 36 - 4 = 32$ ) dengan signifikansi 0,000.

Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan UMKM, atau dengan kata lain bahwa DPK, CAR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

#### b. Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh DPK, CAR dan NPF terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi  $<$  dari  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_0$  ditolak dengan demikian  $H_a$  diterima pun sebaliknya jika nilai signifikansi  $>$  dari  $\alpha = 0,05$  (5%), maka  $H_a$  ditolak dengan demikian  $H_0$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial apabila  $\text{sign.} < \alpha = 0,05$  (5%). Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

**a. Pengujian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Hasil Uji t pada tabel 4.5 di atas untuk variabel DPK terhadap alokasi pembiayaan UMKM, menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu 0,000. Sedangkan nilai koefisien regresi DPK bernilai positif 0,679. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dari variabel DPK yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM diterima.

**b. Pengujian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Hasil uji t pada tabel 4.5 untuk variabel CAR terhadap alokasi pembiayaan UMKM, menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 0,186. Sedangkan nilai koefisien dari CAR yakni sebesar -0,005, maka

dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dari variabel CAR yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM ditolak.

**c. Pengujian *Non Performing Financing* (NPF)**

Hasil uji t pada tabel 4.5 untuk variabel NPF terhadap pembiayaan UMKM, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yakni sebesar 0,008 sedangkan nilai koefisien dari NPF bernilai negatif yakni sebesar -0,017. Maka dikatakan bahwa hipotesis ketiga dari variabel NPF yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM diterima.

**D. Pembahasan**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Penilaian yang dilakukan pada alokasi pembiayaan UMKM sangat diperlukan untuk melihat seberapa efisien dan efektif dalam penggunaan penyaluran dana yang dimiliki oleh bank guna perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan dapat diketahui besarnya penyaluran dana bank syariah dari sisi proporsi alokasi pembiayaan umkm.

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (Uji F) menyatakan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 871,962 lebih besar dari  $F_{tabel}$  yakni 2,90 dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya bahwa variabel DPK, CAR dan NPF

secara bersamaan mempengaruhi alokasi pembiayaan UMKM. Sejalan dengan hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh nilai sebesar 0,987 atau 98,7% yang berarti nilai 98,7% variasi pembiayaan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel DPK, CAR dan NPF. Sedangkan sisanya 1,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Adapun pembahasan mengenai pengaruh DPK, CAR dan NPF berdasarkan hasil uji secara parsial akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM**

Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka yang berasal dari nasabah perorangan atau badan usaha dan kemudian kegiatan yang dilakukan bank setelah itu adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan dalam bank syariah.

Pada analisis data kuantitatif yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS 23 dapat diketahui bahwa DPK berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dijelaskan bahwa variabel bebas bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yakni alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017, hal ini didukung

oleh hasil uji  $t = 21,506$  dengan tingkat signifikan  $0,000$  (signifikan  $< 5\%$ ). Artinya, terdapat pengaruh hubungan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sejalan dengan hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM. Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada perbankan syariah. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang terdapat pada perbankan syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi pembiayaan UMKM. penyaluran pembiayaan menjadi prioritas utama bank syariah dalam pengalokasian dananya, terlebih lagi bank syariah lebih memperhatikan kepada sektor riil nya. Sehingga pihak bank memerlukan dana, dan salah satu sumber dananya adalah dari sumber dana pihak ketiga. Dana ini didapat dari setoran-setoran yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut setelah mendapatkan suntikan dana. salah satunya dari pihak ketiga, maka bank dapat menyalurkan dana – dana tersebut kepada masyarakat, namun proporsi antara dana pihak ketiga yang di alokasikan ke dalam pembiayaan harus diatur.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cokro Wahyu Sujati, Herry Hardianto dan Luh Gede Meilianawati

dimana terdapat pengaruh antara jumlah dana pihak ketiga terhadap kredit usaha kecil dan menengah (UKM).

## **2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap alokasi pembiayaan UMKM**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menjadi faktor penting bagi perbankan untuk mengembangkan usaha serta menampung risiko kerugian yang akan dihadapi bank. Selain itu, modal bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ketersediaan modal yang mencukupi dapat membantu bank syariah untuk menentukan berapa besar pembiayaan yang bisa disalurkan kepada masyarakat serta modal juga digunakan untuk menjaga likuiditasnya. Modal merupakan aspek yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas bank. Sumber modal pada perbankan harus dikelola sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan *return* yang maksimal bagi semua pihak yang terkait. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.

Pada neraca bank sumber modal akan terlihat di sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari keuntungan yang sengaja tidak dibagikan oleh pemegang saham, yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, seperti untuk ekspansi usaha dan untuk menjaga likuiditas bank karena adanya kredit-kredit/



pembiayaan yang diragukan yang berpotensi menjadi kredit/pembiayaan macet.<sup>151</sup>

*Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator penting bagi permodalan bank. Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal perbankan minimum 8%. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang sesuai standar menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Bank Umum Syariah di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan mengenai permodalan tersebut.

Adapun rasio CAR yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Rasio CAR Bank Umum Syariah periode 2015-2017**

TAHUN	CAR (%)
2015	15,02 %
2016	15,95 %
2017	17,91 %

**Sumber: SPS OJK, 2018.**

Dari data CAR pada Bank Umum Syariah di atas, dapat dilihat bahwa tingkat CAR yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah jauh di atas standar minimum CAR yang ditentukan oleh BI yakni sebesar 8%. Perkembangan CAR BUS pun menunjukkan trend yang meningkat. Hal tersebut ditunjukkan hingga tahun 2016 CAR BUS sebesar 15,95% meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 15,02% pada tahun 2015, dan pada tahun 2017 menunjukkan angka lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yakni 17,91%. Tingkat CAR yang tinggi mengindikasikan permodalan yang kuat

---

<sup>151</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 135.

dan peluang untuk menyalurkan pembiayaan dari modal yang digunakan juga besar. Namun hal tersebut perlu didukung dengan manajemen permodalan bank yang baik sehingga dapat mengelola permodalan bank secara efisien. Firman Allah SWT mengenai hal tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Hasyr : 18)<sup>152</sup>

Ayat tersebut menjelaskan hendaknya suatu kegiatan dapat dilakukan melalui suatu perencanaan yang baik agar dapat mencapai tujuan dari kegiatan tersebut, khususnya pada manajemen perbankan syariah. Jika dilihat dari pencapaian Bank Umum Syariah dalam mengelola permodalannya untuk menyalurkan pembiayaan belum dapat dikatakan maksimal, namun dalam mencapai permodalan yang kuat untuk menopang risiko Bank Umum Syariah sudah dapat dikatakan sejalan dengan ayat diatas mengenai perencanaan dalam manajemen.

Berdasarkan hasil uji regresi pada uji t, menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang dimiliki CAR lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar -0,186 dan nilai  $t_{hitung}$  -1,351 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,69389 serta koefisien regresi dari CAR bernilai negatif yakni -0,017.

---

<sup>152</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 548.

Sehingga Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan antara CAR dengan alokasi pembiayaan UMKM.

Artinya semakin tinggi rasio CAR maka akan terjadi penurunan pembiayaan UMKM. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kebijakan manajemen bank yang fokus untuk mempertahankan atau meningkatkan permodalannya diatas CAR minimum 8% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga cenderung menahan dananya untuk memenuhi kebutuhan permodalan (CAR) dan membatasi pemberian pembiayaan. Menurut Billy, tingginya CAR mengindikasikan ada sumber daya finansial (modal) yang idle. Padahal melalui tabel 4.7 rata-rata CAR Bank Umum Syariah pada periode 2015-2017 berkisar cukup tinggi yakni 15,02%-17,91%, jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Hal ini dimungkinkan akibat pulihnya perekonomian dan perbankan syariah berangsur-angsur telah mendorong optimalisasi kegunaan sumber daya finansial (modal) melalui alokasi pembiayaan UMKM. Alokasi pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah mengalami peningkatan seiring dengan penurunan CAR. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alinda Agustina (2012) yang menyatakan CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

Ketentuan pemenuhan rasio modal (CAR) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran

pembiayaan tanpa analisa atau pertimbangan yang tepat terutama pada pihak atau individu yang terafiliasi dengan bank yang bersangkutan. Sesuai konsep bisnis perbankan yakni kepercayaan dan kehati-hatian. Maka sebesar apapun modal yang dimiliki, bank harus dapat mengelola manajemen bank dengan baik, karena masyarakat akan semakin percaya pada bank jika manajemen bank tersebut baik.

Jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat maka dana yang akan terhimpun dari masyarakat oleh bank pun meningkat sehingga bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya tidak bergantung pada modal pemilik semata. Berdasarkan hal tersebut bank harus membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar penghimpunan dana bank ikut meningkat dan penyaluran pembiayaan pun lancar.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat karena adanya faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada bank untuk mengelola dana mereka dalam kegiatan operasional bank seperti pemberian pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum percaya sepenuhnya kepada bank untuk menyimpan dan mengelola dananya karena adanya rasa khawatir apabila sewaktu-waktu

pihak bank tidak mampu mengembalikan dana yang telah dipercayakan kepada bank atau bank mengalami kebangkrutan.<sup>153</sup>

### 3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Npf Performing Financing* (NPF). Adapun rasio NPF pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Rasio NPF PT. Bank Umum Syariah periode 2015-2017**

TAHUN	NPF (%)
2015	4,84 %
2016	4,41 %
2017	4,76 %

**Sumber: SPS OJK, 2018.**

Dari tabel 4.7 dapat dilihat perkembangan rasio NPF pada Bank Umum Syariah, dimana sampai pada tahun 2017 rasio NPF Bank Umum Syariah sebesar 4,76% angka tersebut turun 0,8% dari tahun 2015 sebesar 4,84%, namu di tahun 2016 mengalami penurunan yakni 4,41%

---

<sup>153</sup> Sukma Yoli Lara. “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI) (Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009), h. 10.

dari pada tahun 2017. Artinya tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah masih dalam kategori aman. Dimana berdasarkan ketentuan Bank Indonesia bahwa standar aman rasio *Non Performing Financing* yaitu minimum 5%, lebih dari angka 5% maka bank dalam kondisi bahaya.

Tingkat NPF yang semakin tinggi mengindikasikan risiko pembiayaan yang tinggi dan akan menurunkan perolehan kepercayaan suatu bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pihak bank dapat melakukan tahap-tahap dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan keuntungan bagi perbankan.

Dari tabel 4.7 perkembangan *Non Performing Financing* mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil uji parsial ini menggunakan alat uji statistik menggunakan SPSS 23 menghasilkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan nilai koefisien  $-0,017$  signifikansi  $< \alpha = 0,05$  yakni  $0,008$ . Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dari variabel *Non Performing Financing* yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia diterima.

Hal ini didukung teori Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja

lembaga perbankan, sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa semakin besar nilai NPF maka semakin buruk pula kinerja bank terutama dalam penyaluran pembiayaan, dikarenakan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Bahkan dimungkinkan terjadi potensi pembiayaan yang tidak tertagih, sehingga semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Tingginya NPF juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Dengan demikian besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan oleh perbankan syariah di Indonesia. Akibatnya bank lebih bekerja ekstra demi menekan pencadangan yang lebih besar sehingga pihak perbankan lebih berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya apabila NPF rendah maka bank akan terus melakukan ekspansi pembiayaan. Namun NPF pada penelitian ini bersifat signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM, hal ini dapat disebabkan oleh nilai kecukupan modal yang tinggi sehingga membantu mengcover risiko pembiayaan yang disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah. Sehingga nilai NPF yang cukup tinggi tidak langsung mengakibatkan penurunan pembiayaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti dan Harjum Muharam yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh

negatif namun signifikan terhadap pembiayaan UKM. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Nurbiaty (2017) dan Nurimansyah Setivia Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Rasio NPF yang tinggi akan mempengaruhi Alokasi Pembiayaan UMKM, apabila rasio NPF tinggi maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan rendah. Karena bank tidak ingin menerima resiko lebih tinggi. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Karena sejatinya mereka sangat membutuhkan modal untuk meneruskan usahanya. Pengaruhnya terhadap bank yaitu dapat mengurangi modal perusahaan, karena bank diwajibkan membuat Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) serta akan berdampak pada bagi hasil kepada nasabah simpanan. Apabila ini terjadi terus menerus maka bank syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional.

Dengan demikian manajemen bank harus bisa mengelola sistem perbankan dengan baik untuk meningkatkan modal bank terkait dengan risiko pembiayaan yang dihadapi. Dari sisi manajemen risiko pembiayaan dituntut untuk dapat lebih mengontrol serta memonitor risiko terhadap pembiayaan yang ada di bank syariah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferly Ferdyant yang



menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah.

Dalam perspektif ekonomi islam, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan syariah. NPF timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Pembiayaan tidak boleh mengandung riba, bersifat *gharar* dan *maysir*, riba atau bunga yang ditetapkan dimuka terlepas apakah usaha menguntungkan atau merugi, jelas menambah resiko bisnis. Sebagai pengganti bunga, bank syariah memfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Dalam perspektif ekonomi islam dilihat dari salah satu aspek yaitu Ma'ad atau *return*, setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Dalam orientasi *return* bagi seorang muslim adalah melihat aspek dunia akhirat. Dalam NPF ini bank syariah tidak memakai persentase atau bunga. Melainkan denda, dimana denda tersebut nantinya akan masuk ke dana sosial bukan masuk sebagai modal untuk pembiayaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Analisis secara parsial pada penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga selama periode pada penelitian ini diperoleh hasil nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Dan nilai koefisiennya sebesar 0,679, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan DPK tiap tahunnya meningkat, itu artinya makin terpercaya oleh masyarakat bahwa menyimpan dana di bank syariah aman bahkan menaruh dananya kepada Bank Syariah dalam bentuk pola kerjasama antara nasabah dan bank. Hal ini sejalan dengan Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Dengan demikian Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
2. Variabel *Capital Adequacy Ratio* selama periode pengamatan penelitian diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,186 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%). Dan nilai koefisiennya sebesar -0,005. Sehingga dapat

dikatakan tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dikarenakan bahwa meskipun terbilang baik dalam mengelola modal bank tetapi apabila tidak diimbangi dengan manajemen penyaluran pembiayaan yang efektif, maka bank pun akan terhambat. Hal tersebut dapat terjadi karena alokasi dana yang terhimpun pada bank belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *return* yang maksimal bagi semua pihak yang terkait sehingga mengakibatkan terjadinya pengendapan dana. Seperti untuk ekspansi usaha karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang diragukan berpotensi pembiayaan macet.

3. Variabel *Non Performing Financing* selama periode penelitian ini diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Dan nilai koefisiennya sebesar -0,017. Maka dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena apabila terjadi peningkatan pada NPF maka alokasi pembiayaan UMKM akan mengalami penurunan dan juga semakin besar resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Bila berlangsung terus menerus akan mengurangi modal bank.

## B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah kepada:

1. Perusahaan, untuk memperhatikan nilai Dana Pihak Ketiga karena perubahan pada variabel diatas terbukti berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM, dan faktor lainnya CAR dan NPF dapat diabaikan karena memiliki pengaruh yang sangat kecil bagi alokasi pembiayaan UMKM.
2. UMKM, untuk dapat mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam memajukan usaha UMKM, karena saat ini alokasi pembiayaan untuk UMKM sedah menjadi suatu kewajiban bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan sudah semakin banyak perbankan syariah yang mengadakan program pembiayaan.
3. Akademisi, agar penelitian selanjutnya dapat menambah periode atau objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih tergeneralisasi dan tepat. Selain itu, akademisi dapat menambah variabel penelitian, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga penelitian yang ada lebih valid dan beragam, mengingat dunia perekonomian merupakan dunia yang dinamis.
4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, akan tetapi juga meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi

penyaluran pembiayaan. Dengan demikian mampu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kondisi penyaluran pembiayaan umkm pada BUS secara lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

- Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Arif Rianto Nur M, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anshori Ghofur Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Arifin Arvian dan Rivai Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Asiyah Nur Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Binjai Hasan Halim Abdul Syekh, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cahyono Tri Bambang, *Analisis Bank Syariah*, Jakarta: IPWI, 1994.
- Karim A. Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim A. Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Karim A. Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim A. Adiwarman, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, Edisi I, Cet. ke I, Indonesia, Jakarta, 2003.
- Karim A. Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, Jakarta: Rajawali Pers, 201.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid I*, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.

Hasan A, *Al-Furqan Tafsir Qur'an*, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2010.

Huda Nurul , *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, 2009.

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

John M. Ivancevich, Robert Konopaske,dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Penerbit : Erlangga, 2006.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivaraite dengan Program BM SPSS 19, Edisi 5*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Julianita dan Sarjono, *Spss Vs Lisrel Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Cetakan kedua belas, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Moehar Daniel, *Metodologi Penelitian Social Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014.

Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Priyatno Duwi , *Paham Analisis Data dengan SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2010.

Prayitno Duwi, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Efisien, dan Akurat*, Yogyakarta: Mediakom, 2011.

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS, 2004.

Saefullah Asep dan Sudaryono, *Statistik Deskriptif – Langkah-langkah Mudah Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004.

Sjahdeini Remy Sutan , *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Sunyoto Danang, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Yogyakarta: Media Pressindo ,2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Rivai Veithzal dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Rivai Veitzhal , *Manajemen Kelembagaan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga studi kritis larangan riba dan interpretasi kontemporer*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung: Alfa Beta, 2001.

Chapra Umer M, *Islamic and Economic Deveplopmen*, Yogyakarta: Media Persindo, 2009.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Santoso, *Aplikasi SPSS Pada Statistic Multivariant*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Sujarweni Wiratna V, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Veithzal Permata Andria dan Rivai Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wibowo Edy dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.
- Winarno Wahyu Wing, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan SPSS edisi-4*, Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2015.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodefikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

#### **Literatur Jurnal dan Skripsi :**

- Aditya Galih, Tito. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank di Indonesia*”, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Agustina, Alinda. “*Pengaruh CAR, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit UKM di Indonesia*”, Skripsi Universitas Negeri Medan, 2012.
- Anindita, Irma. “*Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Citra, Cahya Masturina. “*Pengaruh NPF, DPK, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada BPRS di Indonesia*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, 2013.

- Chorida, Luluk. *"Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (studi pada bank-bank syariah di Indonesia)"*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Danistryo, Gerry. *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia"*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Gede Meydianawathi, Luh *"Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)"*, Skripsi universitas Udayana Denpasar Bali, 2006.
- Hani Oktarina Nursyarifah, *Pengaruh DPK, FDR, dan ISR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2015*, Skripsi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung, 2017.
- Hadiyatul maula, Khodijah. *"Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Hardiyanto, Hery. *"Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Serta Implikasinya Pada Return On Assets (ROA) di Bank Muamalat Indonesia"*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010.
- Hayati. *"Analisis pengaruh suku bunga kredit bank umum terhadap permintaan kredit usaha kecil di kota manado"*, skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2006.
- Ulfah Muharramah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Perfoming Financing, dan Size terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Redn Intan Lampung, 2017.
- Machmud, Amir, *"Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia"*. Jurnal Indonesia Membangun Vol 7 No.1 Maret-Juni 2008, ISSN 1412-6907. 2008.
- Perwtaatmadja, Karnaen. *"Istiqomah dalam menjalankan operasional Bank Syariah"*, kertas kerja seminar bank syariah, 24 september 1997.
- Purnama Alam, Pram. *"Ananlisis Faktor- Faktor yang menyebabkan Peningkatan Non Performing Loan (NPL) dan Dampaknya Terhadap Penyaluran Kredit"*

di Sektor UMKM (Studi Kasus di bank BRI), Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2008.

Pratiwi, Susan., & Lela Hindasah. “ *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Net Interest Margin, dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia*” . Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 5 No. 2 September 2014. Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Sahara, Ratna dan Nunung Nurul Hidayah, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Periode 1992-1998 dan 1999-2006*”, Penelitian Universitas Al Azhar Indonesia, 2015.

Sukma Yoli Lara. “ *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI, Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009.*

wahyu ningsih, Sri. “*Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*”, Jurnal Mediagro vol 5 no.1 2009.

Wahyu Sujati, Cokro. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi KUK Pada Bank- Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2004- 2007)*”, skripsi UIIS Yogyakarta, 2007.

Wahyudi, Fajar. “*Kelebihan dan Kelemahan Pembiayaan kepada BPR dengan Pola Executing*”, Makalah pada Workshop/Knowledge Sharing Linkage Program Kepada Pejabat Bank .Pembangunan Daerah, diselenggarakan Oleh Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, Bali, 26-28 Maret 2008.

Wijono, “*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*”, jurnal kajian ekonomi dan keuangan, edisi khusus (november 2005).

Citra, Cahya Masturina. “*Pengaruh NPF, DPK, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada BPRS di Indonesia*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, 2013.

Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002) dikutip oleh Hani Oktarina Nursyarifah, *Pengaruh DPK, FDR, dan ISR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-*

2015 (Skripsi Program Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

### **Literatur Undang- Undang**

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, “Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UU No 21 Tahun 2008 Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1.

Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK. 06/2003.

### **Internet**

<http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018 pukul 10.42 wib.

<http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018 pukul 10.43 wib.

<http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018 Pukul 10.58 wib.

<http://www.depkop.go.id> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 05.42 wib.

<http://www.scribs.com>. Diakses 15 april 2018.

<http://www.Koperasisyariah.com> diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 09.57 wib.

<http://wirausahaanet.tripod.com> diakses pada tanggal 3 Juni Pukul 10.02 wib.

**DAFTAR VARIABEL Y DAN X LAPORAN STATISTIK PERBANKAN  
SYARIAH OTORITAS JASA KEUANGAN  
(BANK UMUM SYARIAH DATA PERBULAN)  
PERIODE 2015 - 2017**

<b>Bulan/Thn</b>	<b>X1 (DPK)</b>	<b>X2 (CAR)</b>	<b>X3 (NPF)</b>	<b>Y (UMKM)</b>	<b>LN_X1 (LN_DPK)</b>	<b>LN_Y (LN_UMKM)</b>
Jan-15	164.291	14,16	5,56	145.976	12,01	11,89
Feb-15	163.159	14,38	5,83	145.817	12	11,89
Mar-15	165.034	14,43	5,49	147.136	12,01	11,9
Apr-15	164.400	14,50	5,20	147.245	12,01	11,9
Mei-15	164.375	14,37	5,44	148.021	12,01	11,91
Jun-15	162.817	14,09	5,09	150.709	12	11,92
Jul-15	165.378	14,47	5,30	149.059	12,02	11,91
Agt-15	164.561	15,05	5,30	149.287	12,01	11,91
Sep-15	166.433	15,15	5,14	151.157	12,02	11,93
Okt-15	165.857	14,96	5,16	150.389	12,02	11,92
Nov-15	167.150	15,31	5,13	150.867	12,03	11,92
Des-15	174.895	15,02	4,84	153.968	12,07	11,94
Jan-16	173.230	15,11	5,46	152.200	12,06	11,93
Feb-16	173.834	15,44	5,59	151.752	12,07	11,93
Mar-16	174.779	14,90	5,35	152.967	12,07	11,94
Apr-16	174.135	15,43	5,48	153.433	12,07	11,94
Mei-16	174.354	14,78	6,17	155.722	12,07	11,96
Jun-16	177.051	14,72	5,68	158.143	12,08	11,97
Jul-16	178.768	14,86	5,32	156.573	12,09	11,96
Agt-16	178.934	14,87	5,55	156.623	12,09	11,96
Sep-16	198.976	15,43	4,67	171.979	12,2	12,06
Okt-16	199.462	15,27	4,80	173.299	12,2	12,06
Nov-16	202.332	15,78	4,68	174.552	12,22	12,07
Des-16	206.407	15,95	4,42	177.482	12,24	12,09
Jan-17	205.783	16,99	4,72	173.466	12,23	12,06
Feb-17	208.429	17,04	4,78	174.625	12,25	12,07
Mar-17	213.199	16,98	4,61	178.081	12,27	12,09
Apr-17	218.944	16,91	4,82	178.124	12,3	12,09
Mei-17	220.392	16,88	4,75	180.632	12,3	12,1
Jun-17	224.420	16,42	4,47	185.570	12,32	12,13
Jul-17	228.080	17,01	4,50	183.623	12,34	12,12
Agt-17	225.440	16,42	4,49	184.354	12,33	12,12
Sep-17	232.349	16,16	4,41	186.152	12,36	12,13
Okt-17	229.957	16,14	4,91	186.122	12,35	12,13

Nov-17	232.756	16,46	5,27	186.366	12,36	12,14
Des-17	238.225	17,91	4,77	189.789	12,38	12,15



**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_X1	36	12,00	12,38	12,1516	,13360
Capital Adequacy Ratio	36	14,09	17,91	15,5486	1,00476
Non Performing Financing	36	4,41	6,17	5,0875	,44271
Ln_Y	36	11,89	12,15	12,0047	,09216
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,01013093
Most Extreme Differences	Absolute		,073
	Positive		,073
	Negative		-,073
Test Statistic			,073
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test		Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>		-261,14224
Cases < Test Value		18
Cases >= Test Value		18
Total Cases		36
Number of Runs		13
Z		-1,860
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063

a. Median

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,918	,352			
	Ln_X1	,679	,032	,985	,180	5,554
	Capital Adequacy Ratio	-,005	,004	-,058	,202	4,958
	Non Performing Financing	-,017	,006	-,081	,459	2,180

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Linear Berganda**  
**Koefiseien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,994 <sup>a</sup>	,988	,987	,01060

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Ln\_X1

b. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,294	3	,098	871,962	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,004	32	,000		
	Total	,297	35			

a. Dependent Variable: Ln\_Y

b. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Ln\_X1

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.



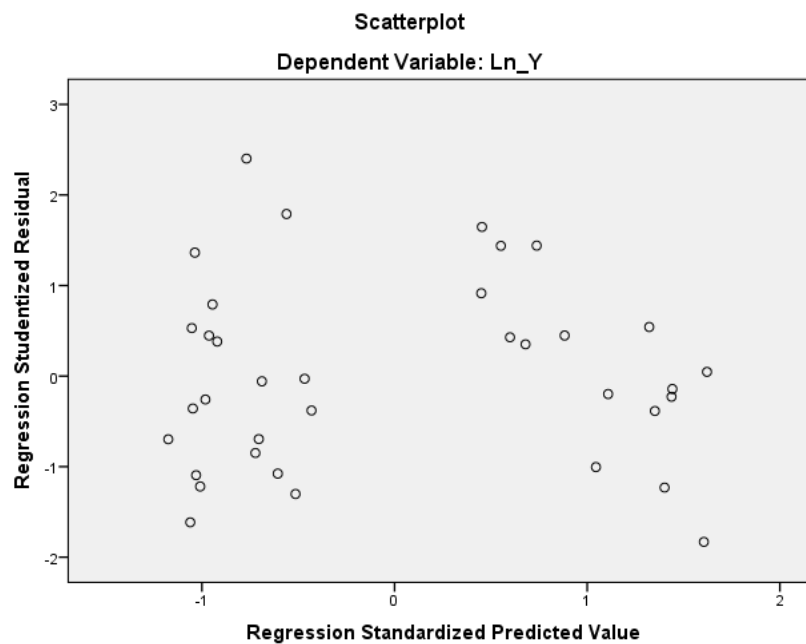
### Hasil Uji t (Parsial)

#### Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	3,918	,352	11,145	,000
	Ln_X1	,679	,032	21,506	,000
	Capital Adequacy Ratio	-,005	,004	-1,351	,186
	Non Performing Financing	-,017	,006	-2,832	,008

Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

**Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Hasil Output SPSS 23 data sekunder yang diolah, 2018.

